

KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM
(Studi Kasus di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Program Studi Ilmu Perpustakaan



Disusun Oleh :

Muhammad Rasyid Ma'ruf
11140050

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Rasyid Ma'ruf

NIM : 11140050

Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kebebasan Intelektual di Perpustakaan Umum (Studi Kasus di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY)" merupakan hasil karya peneliti sendiri untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Oktober 2017



Muhammad Rasyid Ma'ruf

11140050

M. Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS
Dosen Prodi Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Muhammad Rasyid Ma'ruf

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi, menyarankan, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi yang bernama saudara:

Nama : Muhammad Rasyid Ma'ruf
NIM : 11140050
Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Judul : Kebebasan Intelektual di Perpustakaan Umum (Studi Kasus Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Perpustakaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk mempertahankan skripsinya dalam sidang munaqosyah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 Oktober 2017
Pembimbing,



M. Solihin Arianto, S.Ag., SS., M.LIS
NIP. 19700906 199903 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-593/Un.02/DA/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : **KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM (Studi Kasus di Balai Layanan Perpustakaan Ghazama Pustaka BPAD DIY)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RASYID MARUF
Nomor Induk Mahasiswa : 11170080
Telah diajukan pada : Kamis, 28 September 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mahammad Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS.
NIP. 19700906 199903 1 012

Penguji I

Dr. Anis Masruri, S.Ag S.IP, M.Si.
NIP. 19710907 199803 1 003

Penguji II

Alfiati Handayu Dyah Fitriyani, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19850712 201101 2 021

Yogyakarta, 28 September 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Yogyakarta



Prof. Dr. H. Swan Kheiri, M.A.
NIP. 19601224 198803 1 001

MOTO

KAMI AKAN MEMBACAKAN (AL QURAN) KEPADAMU (MUHAMMAD) MAKA
KAMU TIDAK AKAN LUPA (QS. AL A'LA : 6)

JANGAN BIMBANG DALAM MENGHADAPI MACAM-MACAM PENDERITAAN,
KARENA MAKIN DEKAT CITA-CITA KITA TERCAPAI, MAKIN BERAT
PENDERITAAN YANG HARUS KITA ALAMI (JENDRAL SOEDIRMAN)

BANGSA YANG KEHILANGAN KESADARAN AKAN MASA LALUNYA,
PERLAHAN-LAHAN AKAN KEHILANGAN DIRINYA (MILAN KUNDERA)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Untuk kedua orangtua beserta keluarga tercinta,

dan

Almamater terhormat,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM
(Studi Kasus di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY)
Muhammad Rasyid Ma'ruf
NIM.11140050

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam sejauh mana kebebasan intelektual di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka (GTP) BPAD DIY. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Metode penelitian menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebebasan Intelektual di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka sudah dilaksanakan. Hanya saja masih ditemukan adanya hal-hal yang mempengaruhi implementasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya seperti belum adanya rumusan kebebasan intelektual secara utuh dalam kebijakan pengembangan koleksi, faktor anggaran dan jumlah penerbitan bahan perpustakaan yang sedikit, faktor politik dan hukum yang sedang berlangsung, dan hubungan komunikasi yang kurang baik antar pegawai fungsional yang terdiri dari pustakawan dengan pegawai struktural atau administrasi sebagai pelaksana lapangan mengakibatkan tidak berjalan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi dan menyebabkan penerapan kebebasan intelektual menjadi tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Kebebasan Intelektual, Kebijakan pengembangan koleksi, Akses Informasi, penyebaran informasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

INTELLECTUAL FREEDOM IN THE PUBLIC LIBRARY
(Case Study Research in the Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka
BPAD DIY)
Muhammad Rasyid Ma'ruf
NIM.11140050

ABSTRACT

This study aims to find and describe in depth the extent of intellectual freedom in the Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka (GTP) BPAD DIY. This type of research uses descriptive qualitative. The research method used interview, observation, and documentation. The result of the research shows that Implementation of Intellectual Freedom in the Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka has been implemented. Nevertheless, there are several factors impede with in, there has been no detailed and complete explanation of intellectual freedoms in the collection development policy, then financial factors and limited book publishing, socio-political conditions that censor by limiting access to certain information, not good communication between functional employees with structural employees and lack of understanding of librarians related to intellectual freedom.

Keywords: intellectual freedom, collection development policy, access of information, dissemination of information

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam serta melimpahkan rahmatNya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kebebasan Intelektual di Perpustakaan Umum (Studi Kasus di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka)” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumul akhir.

Tentu peneliti tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik tanpa pihak-pihak yang dengan tulus dan terbuka memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti. Peneliti berterima kasih kepada beberapa pihak di antaranya:

1. Prof. Dr. Alwan Khoiri, M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bermanfaat kepada peneliti.
2. Drs. Djazim Rohmadi, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang semoga bermanfaat dan mendukung dalam penyelesaian penulisan skripsi.

3. M. Solihin Arianto, S.Ag., S.S., M.LIS selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebijaksanaanya membimbing peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Dra. Labibah, MLIS selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan peneliti dalam mencari dan menelusuri bahan-bahan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Perpustakaan dan seluruh karyawan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk peneliti dalam menerapkan ilmu perpustakaan.
6. Drs. Budiono, SIP selaku Pustakawan Madya BPAD DIY, Bapak Muhammad Rosyid Budiman, S.Si selaku Kasubid. Deposit dan Pengolahan Bahan perpustakaan BPAD DIY, dan Ibu Maeranti, S.H selaku Kasubbid Pelayanan Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka yang telah memberikan kerjasama yang baik, kesabaran dan kekeluasaan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Untuk keluarga tercinta, Ibu Suranti, Bapak Suwarno, Falah dan keluarga yang selalu memberikan doa tulus dan kesabarannya kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Alfian Fuadmadji, Rizki Medina Irwani, Nasirudin, Said Harmansyah, Nurul Huda Bawean yang menjadi *second reader* dalam penulisan skripsi ini.

9. Untuk Teman-teman IPI 2011 khususnya kelas B terimakasih atas persahabatannya selama ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan.
10. Teman, sahabat, dan tetangga sekitar rumah yang kadang-kadang menampar dengan kata-kata yang memanaskan dinginya rasa bosan dan malas yang begitu akut.
11. Dan tidak lupa untuk kaum-kaum “Paguyuban Menolak Mikir” sebagai lilin yang menerangi gelapnya ruang kelesuan dan keengganan yang begitu pekat.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

Muhammad Rasyid Ma'ruf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
INTISARI	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Fokus Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Perpustakaan Umum	11
2.2.1.1 Definisi Perpustakaan Umum	12
2.2.1.2 Ciri-Ciri Perpustakaan Umum	12
2.2.1.3 Tujuan Perpustakaan Umum	13
2.2.2 Kebebasan Intelektual	14
2.2.2.1 Pengertian Kebebasan Intelektual	14
2.2.2.2 Prinsip-Prinsip Kebebasan Intelektual	18
2.2.3 Sensor	23
2.2.3.1 Definisi Sensor	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Subyek dan Obyek	30
3.4 Informan.....	31
3.5 Instrumen Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Analisis Data	36
3.8 Teknik keabsahan data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum	42
4.1.1 Sejarah Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	42
4.1.2 Visi Misi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	45
4.1.3 Tujuan Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	46
4.1.4 Struktur Organisasi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	47
4.1.5 Jenis Layanan di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	48
4.1.6 Koleksi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY	51
4.1.7 Syarat Peminjaman Buku	52
4.1.8 Keanggotaan Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	52
4.1.9 Jumlah Koleksi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	55
4.1.9.1 Jumlah Koleksi Berdasarkan Kelas DDC	56
4.1.9.2 Koleksi Digital Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	58
4.1.10 Ketentuan Umum Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka	59
4.1.11 Jam Buka Layanan	61
4.2 Pembahasan	61
4.2.1 Pemahaman Pustakawan terkait Kebebasan Intelektual	61
4.2.2 Implementasi Kebebasan Intelektual dalam Pengembangan Koleksi	63
4.2.3 Implementasi Kebebasan Intelektual dalam Akses Informasi	83
4.2.4 Implementasi Kebebasan Intelektual dalam Penyebaran Informasi	86
4.2.5 Tantangan-Tantangan dalam Implementasi Kebebasan Intelektual	88

BAB V PENUTUP.....	95
5.1 Simpulan	95
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	102



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Analisis Kebebasan Intelektual	26
Tabel 2. Struktur Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	44
Tabel 3. Struktur Organisasi Balai Layanan Perpustakaan GTP	47
Tabel 4. Anggota Pemustaka Balai Layanan Perpustakaan GTP	54
Tabel 5. Jumlah Pengunjung GTP	55
Tabel 6. Jumlah Keseluruhan Koleksi GTP	56
Tabel 7. Jumlah Koleksi Berdasarkan Subyek Kelas DDC	57
Tabel 8. Jumlah Koleksi Digital	58
Tabel 9. Jam Buka Layanan	61
Tabel 10. Kebebasan Intelektual dalam Pengembangan Koleksi	81
Tabel 11. Kebebasan Intelektual dalam Akses Informasi	85
Tabel 12. Kebebasan Intelektual dalam Penyebaran Informasi	87

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	104
Lampiran 2. Catatan Lapangan	106
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Informan 1	110
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Informan 2	117
Lampiran 4. Reduksi Data	127
Lampiran 5. Struktur Organisasi BPAD DIY	142
Lampiran 6. Dokumentasi Koleksi Grhatama Pustaka	143
Lampiran 4. Rumusan Kebijakan Pengembangan Koleksi BPAD DIY	145
Lampiran 5. Lembar Persetujuan Informan	146
Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kundera (2015:4) mengatakan bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Agar masalah lupa yang dialami oleh suatu bangsa akan sejarah dan nilai-nilai masa lampau, diperlukan instrumen untuk menyimpan produk-produk sejarah dan kebudayaan sebagai ingatan kolektif bangsa salah satunya ialah perpustakaan. Karena pentingnya keberadaan perpustakaan Byrne (2003) menegaskan bahwa kehancuran perpustakaan melambangkan kehancuran suatu kebudayaan, suatu warisan kebudayaan hanya akan tersimpan dengan baik dalam sebuah perpustakaan yang dianggap sebagai rumah ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Byrne menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan kunci bagi pelestarian warisan kebudayaan, penyedia akses kepada pengetahuan, informasi, ide-ide kepada setiap warganya dengan setara, sehingga setiap orang akan memiliki modal kultural dengan memanfaatkan perpustakaan.

Sedangkan Cosette (dalam Ariyani, 2015:45) menyatakan bahwa perpustakaan adalah penyedia informasi yang bersifat netral atau tidak memihak suatu kelompok atau individu. Perpustakaan menyediakan informasi bagi semua warga tanpa memandang status sosial sehingga perpustakaan adalah lembaga yang mendukung ide demokrasi. Untuk mendukung dan mewujudkan

perpustakaan sebagai institusi netral dan demokratis, *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) sebagai lembaga pustakawan internasional menjelaskan bahwa perpustakaan berperan dalam usaha mengembangkan dan menjaga kebebasan intelektual, nilai-nilai kemanusiaan dan nilai demokrasi. Sebagai tempat untuk menyimpan ide-ide terekam, maka perpustakaan memiliki kewajiban untuk menyimpan, dan menyebarkan ide maupun informasi tanpa suatu batasan dan larangan. Istilah kebebasan intelektual dipromosikan oleh *Association Library of America* (ALA) melalui *The ALA Office for Intellectual Freedom* mendefinisikan kebebasan intelektual sebagai hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi dari segala sudut pandang tanpa larangan. Kebebasan intelektual menyediakan akses terbuka bagi segala ekspresi dan gagasan melalui berbagai jenis tindakan dan mengarahkan individu pada kebebasan untuk menerima dan menyebarkan gagasan/ide.

Dalam konteks keilmuan perpustakaan, kebebasan intelektual termasuk dalam kajian pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan dasar dari seluruh implementasi kebebasan intelektual. Evans (2005:411) menegaskan bahwa kebijakan pengembangan koleksi sebagai pondasi perpustakaan dalam menjalankan kebebasan intelektual. Hal ini dipertegas oleh Osburn (1991:169) yang mengatakan fokus pada hubungan antara kebijakan pengembangan koleksi dengan kebebasan intelektual terletak pada kebijakan seleksi koleksi. Seleksi koleksi merupakan *nucleus* (inti) dan sebagai manifestasi kebijakan pengembangan koleksi. Lebih lanjut Osburn menjelaskan bahwa

kebijakan pengembangan koleksi sebagai dasar dari kebebasan intelektual, maka proses seleksi koleksi merupakan inti dari proses kegiatan pengembangan koleksi.

Hambatan dan tantangan dalam kebebasan intelektual berupa kebijakan sensor. *The ALA Office for Intellectual Freedom* menjelaskan sensor merupakan tekanan terhadap ide/gagasan dan informasi yang dilakukan oleh pihak tertentu baik individu, kelompok tertentu maupun pemerintah. Sensor menekan institusi publik seperti halnya perpustakaan untuk menghilangkan atau membatasi akses terhadap informasi yang dianggap tidak sesuai dan berbahaya. Beberapa penerapan sensor dalam ranah kepustakawanan menurut *Florida Library Association* (FLA) terjadi pada kebijakan pengembangan koleksi ketika perpustakaan tidak memperbarui kebijakan pengembangan koleksi dan mengeluarkan koleksi tanpa proses pertimbangan terlebih dahulu (2014:9)

Dikotomi kebebasan intelektual dan sensor merupakan dua sisi mata uang dan dilematis terhadap perpustakaan dan pustakawan. Perpustakaan memiliki fungsi melindungi, menyimpan, melestarikan dan menyebarkan informasi dan karya intelektual kepada semua pemustaka dengan baik, namun di sisi lain, perpustakaan harus tunduk terhadap peraturan sensor dan kebijakan negara yang bersangkutan. ALA dalam *Library Bill of Right* (1996) pasal pertama mengatakan bahwa bahan perpustakaan tidak dilarang atau dikeluarkan atas latar belakang sudut pandang atau ideologi pemikiran dari penciptaannya (penulis dan penerbitannya). Artinya, pernyataan tersebut menghubungkan kebebasan intelektual dengan aktivitas pengembangan koleksi. Khususnya dalam proses seleksi dan akuisisi bahan perpustakaan. Perpustakaan dan pustakawan selektor

harus dapat menjalankan aktivitas kepastakawanannya dengan sikap professional dan netral terhadap apapun latar belakang dari bahan perpustakaan.

Menurut Drs. Budiono, SIP selaku Pustakawan Madya BPAD DIY dalam wawancara pada 11 Juli 2017 menjelaskan bahwa kebebasan intelektual ada seiring adanya kebijakan sensor. Kebebasan intelektual dipahami sebagai kebebasan berekspresi dan menghindari sensor. Selektor tidak boleh menyeleksi dan mengadakan koleksi berdasarkan selera pribadi dan perpustakaan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat.

Namun peneliti menemukan kebijakan sensor dalam kebijakan pengembangan koleksi yaitu dalam pengadaan dan seleksi koleksi. Drs Budiono, SIP mengatakan sebagai berikut:

“Dalam pengembangan koleksi kami memperhatikan latar belakang penulisan sebuah buku. Namun tidak sepanjang zaman tergantung situasi kondisi politik dan keamanan di masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam seleksi koleksi.”

Dengan adanya pertimbangan latar belakang penulis menunjukkan adanya kebijakan sensor dalam pengembangan koleksi, sebenarnya perpustakaan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan intelektual karena dengan pertimbangan latar belakang penulis akan menimbulkan bias selektor. Menurut Byrne (1999:2) bahwa kebebasan intelektual sebagai prinsip dasar praktek kepastakawanan, prinsip dalam kebijakan pengembangan koleksi dan prinsip menyediakan akses informasi. Peran perpustakaan dalam mengembangkan dan menjaga kebebasan intelektual merupakan peran yang strategis dan penting dalam

aktivitas kepastakawanan. Hal ini agar menciptakan koleksi yang beragam dan seimbang yang sesuai dengan kebutuhan seluruh lapisan pemustaka. Koleksi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY dalam wawancara dengan Ibu Maeranti pada 20 Maret 2017 bahwa perpustakaan untuk koleksi buku tercetak memiliki koleksi dengan jumlah 157.576 judul dan 261.495 eksemplar dan ini masih bersifat sementara karena sedang pendataan ulang seluruh koleksi. Dengan adanya sentimen atau bias selektor hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan intelektual untuk mengelola dan menciptakan koleksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka sangat diperlukan dan penting. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kegiatan kebebasan intelektual di Balai Layanan Grhatama Pustaka BPAD DIY.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman pustakawan tentang kebebasan intelektual di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY?
2. Bagaimanakah implementasi konsep kebebasan intelektual dalam pengembangan koleksi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY?
3. Bagaimanakah implementasi konsep kebebasan intelektual dalam akses dan penyebaran informasi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY?

4. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam implementasi kebebasan intelektual di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY?

1.3 Fokus Penelitian

Batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fokus penelitian tentang kebebasan intelektual ditinjau pada unsur-unsur penting dalam kebebasan intelektual diantaranya; pengembangan koleksi perpustakaan, akses informasi, dan penyebaran informasi. Bahan perpustakaan yang akan diteliti merupakan buku cetak di Balai Layanan Grhatama Pustaka BPAD DIY karena koleksi buku cetak yang diadakan dan diseleksi sendiri oleh pustakawan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kebebasan intelektual di Balai Layanan Grhatama Pustaka BPAD DIY.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan serta dapat menambah pengetahuan baru, wawasan, pengalaman dalam penelitian mengenai kebebasan intelektual.
2. Bagi instansi tempat penelitian ini dapat memberi sumbangan ataupun masukan kepada instansi terkait mengenai proses kebebasan intelektual dan kebijakan perpustakaan dalam melindungi kebebasan intelektual di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY .

3. Bagi kepentingan ilmiah hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian sejenis maupun dalam pengembangannya serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan bidang perpustakaan dan informasi, khususnya mengenai kebebasan intelektual di perpustakaan.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I. Latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Bab ini menguraikan beberapa penelitian tentang kebebasan intelektual yang telah dilakukan sebelumnya dan menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, definisi-definisi, dan uraian yang akan diselesaikan melalui penelitian.

BAB III. Metode penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, informan dan teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV. Analisis tentang gambaran umum Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY, pembahasan secara terperinci serta hasil analisis kebebasan intelektual di Balai Layanan Perpustakaan Grahata Pustaka BPAD DIY.

BAB V. Penutup yang meliputi dua bagian yaitu simpulan penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dari bab-bab sebelumnya dalam melakukan penelitian selama di lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebebasan intelektual sudah dilaksanakan. Hanya saja implementasi kebebasan intelektual belum sepenuhnya maksimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan intelektual, hal ini disebabkan oleh:

1. Belum adanya rumusan kebebasan intelektual secara utuh dan jelas dalam kebijakan pengembangan koleksi. Karena masih berupa garis-garis besar dari prinsip kebebasan intelektual.
2. Faktor keuangan perpustakaan. Untuk menjalankan kebebasan intelektual yang berkaitan dengan pengembangan koleksi karena perpustakaan diberikan kebebasan dalam mengadakan dan menyeleksi bahan perpustakaan secara bebas dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka yang luas dan beragam, maka perpustakaan mengalami keterbatasan anggaran dalam kebijakan pengembangan koleksi. Dan karena sedikitnya penerbitan yang ada sehingga perpustakaan harus membeli ke luar daerah untuk memenuhi target penyerapan anggaran.
3. Situasi dan Kondisi Politik, Hukum, dan Keamanan (POLHUKAM) yang berkembang di masyarakat . Dengan faktor politik dan hukum Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka pernah melakukan tindakan sensor dengan mempertimbangkan latar belakang penulis dari suatu bahan perpustakaan

dalam proses seleksi dan akuisisi bahan perpustakaan karena desakan peraturan dari pemerintah terkait informasi yang dianggap berlawanan dengan negara. Selain itu, juga perpustakaan pernah membatasi akses informasi yang dianggap kontroversi atau yang bermuatan ideologi yang berlawanan dengan pemerintah, kemudian perpustakaan hanya menyediakan akses informasi tersebut khusus untuk peneliti saja dan diharuskan mengurus izin dari pihak yang berwenang untuk mengakses informasi tersebut. Pembatasan akses tersebut dengan tidak sirkulasi secara bebas, hanya ada pembatasan akses untuk peneliti saja dan tidak dapat dipinjam keluar dari perpustakaan. Perpustakaan mengartikan pelarangan tersebut hanya bersifat tidak boleh untuk disirkulasikan bahan perpustakaan secara bebas, namun perpustakaan tetap memiliki kewenangan dan hak untuk tetap menyimpan untuk kepentingan generasi mendatang.

4. Faktor Komunikasi. Hubungan komunikasi yang kurang baik antar pegawai fungsional yang terdiri dari pustakawan dengan pegawai struktural atau administrasi sebagai pelaksana lapangan mengakibatkan tidak berjalan pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi dan menyebabkan penerapan kebebasan intelektual menjadi tidak terlaksana dengan baik. Latar belakang pendidikan pegawai struktural yang bukan lulusan ilmu perpustakaan menyebabkan ketidaktahuan tentang pemahaman kebijakan pengembangan koleksi yang ada sebagai pedoman dalam implementasi kebebasan intelektual.

5.2 Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran kepada Balai Layanan Perpustakaan Grahata Pustaka diantaranya:

1. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh jajaran pegawai struktural maupun fungsional BPAD DIY terkait kebijakan pengembangan koleksi yang sudah dirumuskan sebagai pedoman dalam menjalankan kebebasan intelektual.
2. Kebijakan pengembangan koleksi yang sudah dirumuskan pada 2009 belum ada edisi revisi dan pembaharuan menyesuaikan perkembangan kebutuhan pemustaka dan memperjelas rumusan prinsip-prinsip kebebasan intelektual.
3. Balai Layanan Perpustakaan Grahata Pustaka perlu memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada pustakawan selektor terkait dengan kebebasan intelektual dan implementasinya dalam menjalankan aktivitas kepustakawanannya.
4. Kerjasama dan komunikasi antarpegawai fungsional dan struktural ditingkatkan agar dalam proses pengembangan koleksi tercipta koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Arko-Cobbah. "Intellectual freedom and academic freedom: opportunities and challenges for academic libraries in Africa". Dalam http://www.codesria.org/IMG/pdf/Albert_Arko_Cobbah.pdf. Diunduh pada tanggal 20 September 2016
- Alfiathi, Isna. 2009. Representasi Kebebasan Intelektual di Perpustakaan: Analisis Semiotika pada Serial Animasi Toshokan Senso (Library War) .(Skripsi). Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- American Library Association. "Intellectual Freedom and Censorship Q&A". 2014 <http://www.ala.org/Template.cfm> (Di akses pada 10 September 2017)
- American Library Association. "Office of Intellectual Freedom". 2014 <http://www.ala.org/ala/aboutala/offices/oif/> (Di akses pada 17 September 2017)
- American Library Association. 1939. The Library Bill of Rights. American Library Association Bulletin, Vol.33 hal.60-61
- Anonim. 2014. *Intellectual Freedom Manual*. Florida Library Association
- Arianto. M. Solihin. 2012. Materi perkuliahan manajemen Koleksi. Prodi. Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ariyani, Sri Luh Putu. 2015. "Perpustakaan Sebagai Ruang Public (Perspektif Habermasian)". Dalam ejournal.undiksha.ac.id/index.php/AP/article/download/. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul 12:15 WIB
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta

Awaluddin, Iwan. 2010. *Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. Yogyakarta: PR2Media.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Yogyakarta. 2009. *Dokumen Kebijakan Pengembangan Koleksi*.

Bowden, Russell. 1999. "Access to Information: A Librarian's Responsibility?"
Dalam <http://www.ifla.org/files/assets/faife/bowden.pdf>. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 18:30 WIB

Byrne, Alex. 2003. "Necromancy or Life Support? Libraries, Democracy and The Concerned Intellectual". Dalam <https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream>. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 20:00 WIB

-----, 1999. "See Librarian": University Libraries and Intellectual Freedom".
Dalam <http://www.alia.org.au/sections/ucrls/aarl/index.html> . Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016

Evans, G. Edward. 2005. *Censorship, Intellectual Freedom, and Collection Development*. 5th ed. Libraries Unlimited: Westport.

Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. 2006. *Etika Pustakawan*. Sagung Seto: Jakarta

Kundera, Milan. 2015. *Novel Kitab Lupa dan Gelak Tawa*. Penerbit Narasi: Yogyakarta.

Johnson, Peggy. 2009. *Fundamentals of Collection Development and Management*. ALA Publisher

- Jones, Barbara. 1991. *"Intellectual Freedom Policies for Information Content."* Diakses dalam www.google.books.com/iffpolicy pada tanggal 21 Oktober 2016.
- Layyina, Lilik. 2011. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bahan pustaka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Yogyakarta. (Skripsi) Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mangemba. 2011. "Censorship Impedes Intellectual Freedom". Dalam www.academia.edu/11368225/Censorship_impedes_intellectual_freedom_the_librarianship_dilemma. Diunduh pada 23 Januari 2017.
- McNikol, Sarah. 2016. School Librarian's Intellectual Freedom Attitude and Practices. *New Library World*. Vol.117 Iss 5/6 pp.329-342. Dalam www.emeraldinsight.com/doi/full/. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 21:10 WIB
- Moody, Kim. 2005. Covert Censorship in Libraries : a discussion paper. *The Australian Library Journal*, Hal.138-147: Australia.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Osburn, Charles B. 1991. Collection Management and Intellectual Freedom. *Library Trends*. Vol.39, Nos 1&2 pp.168-182. University of Alabama.
- Pooley, Alexandra. 2007. *"Ethical Training:Censorship and Intellectual Freedom in the Public Library."* University of Sheffield. Dalam http://dagda.shef.ac.uk/dispub/dissertations/2006-07/External/Pooley_Alexandra_MALib.pdf. Diunduh pada tanggal 18 Oktober 2016 pukul 22:00 WIB

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Alfabeta: Bandung.

-----, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Sulistyo Basuki. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007. Dalam <http://www.perpusnas.go.id/law/undang-undang-nomor-43-tahun-2007-tentang-perpustakaan/>. Diunduh pada 20 Oktober 2016 pukul 10:35

Universal Declaration of Human Right. Dalam <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2016 pukul 19:30 WIB

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama :.....

Keterangan :.....

1. Dalam pengadaan koleksi, apakah latar belakang ideologi dan aktivitas politik penulis menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan koleksi?
2. Apakah sentimen pribadi, sentimen politik, agama, dan moral mempengaruhi selektor dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi? Ataukah dengan pertimbangan profesional?
3. Dan apakah dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi perpustakaan mengakomodir atau mempertimbangkan larangan akan bahan perpustakaan tertentu yang diajukan oleh pihak atau lembaga tertentu? misalkan saja Kejaksaan Agung
4. Dan bagaimana sikap perpustakaan terhadap bahan perpustakaan yang dilarang tersebut? Apakah tetap akan diakuisisi atau tidak?
5. Apakah semua bahan perpustakaan di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY dapat diakses semua golongan masyarakat pengguna seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis?
6. Apakah perpustakaan melindungi hak privasi (sesuai dengan kebutuhannya) pengguna dalam mengakses informasi di perpustakaan?
7. Sebagai penyedia informasi, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah bebas dalam diseminasi(penyebaran) informasi?

8. Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyebaran informasi?
9. Sebagai ruang publik yang dapat diakses semua golongan masyarakat, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah memberikan ruang atau fasilitas bagi seluruh golongan masyarakat? Misalnya seperti ruang akses khusus anak-anak atau ruang khusus bagi kaum difabel?
10. Apakah perpustakaan menentang sensor baik itu berasal dari pemerintah daerah/pusat?
11. Bagaimana sikap perpustakaan terhadap sensor (tindakan pelarangan dari lembaga atau kelompok tertentu atas koleksi perpustakaan)?
12. Adalah usaha-usaha perpustakaan dalam mendukung kebebasan intelektual?
13. Apakah perpustakaan pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kebebasan berekspresi seperti dengan lembaga swadaya masyarakat tertentu?
14. Walaupun dalam aktivitasnya dibiayai oleh masyarakat, bagaimana sikap perpustakaan jika ada individu atau lembaga yang mengintervensi dalam kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan? Misalnya melarang atau tidak merekomendasikan sebuah buku ?

Catatan Lapangan (Pra Observasi)

Tempat : Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka

BPAD DIY

Waktu : 3 Februari 2017

Metode Pengumpulan Data : Observasi

Sumber Data : Situasi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama

Pustaka BPAD DIY, situasi di Bagian Layanan

Sirkulasi

Deskripsi Data :

1. Waktu menunjukkan jam 10.30 di Layanan Sirkulasi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY. Peneliti melihat beberapa petugas perpustakaan sedang melayani pengunjung untuk peminjaman buku di Layanan Sirkulasi. Kondisi gedung dan ruang di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY yang nyaman dan proporsional memberikan gerak yang leluasa bagi pemustaka. Selain fasilitas gedung yang baik, ditunjang juga dengan fasilitas perlengkapan fisik seperti, meja dan kursi yang beragam, terdapat juga ruang baca di lantai dengan tempat duduk yang nyaman.
2. Dengan gedung yang luas dan bertingkat, Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka memiliki layanan yang baik dan beragam. Layanan tersebut dapat mengakomodir beberapa lapisan masyarakat, bahkan desain

gedung dan ditunjang dengan fasilitas bagi kaum minoritas dan difabel. Terdapat akses jalan bagi kaum difabel, serta pada lantai 1 gedung terdapat Layanan Koleksi Braille yang dirancang khusus untuk pemustaka yang berkebutuhan khusus. Sedangkan lantai dasar, terdapat gedung dan ruang untuk khusus Layanan Anak. Layanan Anak tersebut terdiri dari Ruang Musik dan Bermain anak dan Ruang Baca Anak.

3. Koleksi-koleksi yang ditampilkan oleh Balai Layanan Perpustakaan Grhtama Pustaka lengkap dan luas. Untuk Layanan Sirkulasi, terdapat seluruh rak dengan menyesuaikan kelas DDC dari kelas 000 hingga 900. Misalnya, peneliti mengamati pada rak dengan kelas 200 yang menyediakan koleksi-koleksi dengan tema dan judul agama dan aliran-alirannya. Koleksi agama yang ada mayoritas koleksi dengan tema agama Islam dan Nasrani. Untuk memudahkan pemustaka dalam mencari judul atau koleksi yang akan dicari, terdapat tiga komputer dengan fasilitas katalog *online* atau OPAC. Peneliti mengamati beberapa pemustaka, terdapat beberapa pemustaka dengan seragam sekolah dari tingkat dasar hingga atas. Selain siswa sekolah terdapat juga beberapa pemustaka dari latar belakang mahasiswa maupun pegawai.

Catatan Lapangan (Penelitian)

Tempat : Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka

Metode Pengumpulan Data : Wawancara

Tanggal : 1) 10 Februari 2017, 2) 20 Maret 2017, 3) 11 Juli 2017

Sumber Data : Muhammad Rosyid Budiman (Kasubid. Pengolahan), Maeranti (Kasubid. Pelayanan) dan Budiono (Pusakawan Madya)

Deskripsi Data :

1. Peneliti melakukan wawancara selama tiga kali. Wawancara untuk pertama dengan Bapak Rosyid Budiman yang berkaitan kebebasan intelektual dan pengembangan koleksi. Dalam hal kebebasan intelektual peneliti fokus terhadap bagaimana proses seleksi koleksi yang berkaitan dengan kebebasan intelektual. Proses seleksi yang profesional dan menghindari bias pribadi selektor. Pada saat peneliti mempertanyakan apakah ada kebijakan pengembangan koleksi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada Bapak Rosyid Budiman ternyata beliau tidak mengetahui dan tidak paham jika sudah ada kebijakan pengembangan koleksi yang ditetapkan pada tahun 2009.

Karena terdapat permasalahan atas ketidaktahuan Bapak Rosyid Budiman terkait kebijakan pengembangan koleksi yang sudah ada,

maka peneliti mengkonfirmasi kepada Drs. Budiono sebagai Pustakawan Madya BPAD DIY dan salah satu anggota perumusan kebijakan pengembangan koleksi. Hasil konfirmasi adalah bahwa sudah ada kebijakan pengembangan koleksi sebagai pedoman untuk proses pengembangan koleksi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka. Namun, permasalahan tersebut, menurut beliau dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara pegawai fungsional yang terdiri dari kelompok pustakawan dan pegawai struktural yang bertugas sebagai pegawai yang mengurus administrasi.

2. Kemudian wawancara selanjutnya, peneliti menanyakan akses informasi kepada Ibu Maeranti bagaimana perpustakaan memberikan dan menyediakan akses informasi tanpa suatu batasan apapun. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses segala informasi yang ada di perpustakaan bahkan untuk mereka kaum minoritas dan difabel. Lebih lanjut, perpustakaan sebagai tempat terbuka dan belajar secara mandiri yang dapat diakses oleh siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Drs. Budiono, SIP

Keterangan : Pustakawan Madya BPAD DIY

- 1. Dalam pengadaan koleksi, apakah latar belakang ideologi dan aktivitas politik penulis menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan koleksi?**

Dalam pengembangan koleksi kami memperhatikan latar belakang penulisan sebuah buku. Namun tidak sepanjang zaman tergantung situasi kondisi politik dan keamanan di masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam seleksi koleksi. Misalnya seperti penulis Pramodya Ananta Toer (Pram) agak kita negatifkan seperti beberapa tahun silam. Atau ada buku-buku untuk sekolah dasar yang dicurigai memuat bahasa atau seks yang belum sesuai dengan kebutuhan anak-anak tidak kami adakan atau seleksi. Selama ini perpustakaan bukan menjadi penghalang penulis dan penerbit untuk menerbitkan sebuah buku. Perpustakaan sebagai pusat informasi sehingga jika ada pelarangan sebuah buku dari pihak berwenang, perpustakaan tetap memiliki wewenang untuk menyimpan informasi. Kami masih menyimpan koleksi-koleksi ajaran komunisme, marxisme-leninisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan belum pernah ada keluhan atau pelarangan/bredel terkait koleksi-koleksi semacam itu

karena perpustakaan memiliki hak sebagai tempat menyimpan, sebagai tempat pendidikan, penelitian, pusat informasi, pelestarian dan sebagai tempat rekreasi intelektual. Barangkali, dokumen-dokumen bahan perpustakaan yang terlarang menjadi area penelitian.

2. Apakah sentimen pribadi, sentimen politik, agama, dan moral mempengaruhi selektor dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi? Ataukah dengan pertimbangan profesional?

Kita sebagai pihak selektor harus bersikap adil dan profesional karena kita mengadakan dan menyeleksi bahan perpustakaan untuk kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pribadi selektor maupun pertimbangan sentimen. Kami berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat luas dengan memenuhi kebutuhan dari anak-anak hingga dewasa. Untuk bahan perpustakaan anak-anak dan dewasa, kami menyesuaikan dan menempatkannya secara terpisah, misalnya terdapat bahan perpustakaan yang berisi pornografi atau pendidikan seks, tentunya hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa dan kami letakkan di layanan umum yang tidak terjangkau anak-anak. Selektor tidak boleh terlalu berambisi dengan kemauannya dalam pengadaan bahan perpustakaan. Ada kriteria-kriteria selektor yang harus dipenuhi di antaranya; a. Harus menguasai perbukuan; b. Harus menguasai bibliografi; c. Harus berfikiran luas.

3. Dan apakah dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi perpustakaan mengakomodir atau mempertimbangkan larangan akan bahan perpustakaan tertentu yang diajukan oleh pihak atau lembaga tertentu? misalkan saja Kejaksaan Agung.

Kita perhatikan itu, jika ada larangan dari lembaga negara dengan tidak mensirkulasikan bahan perpustakaan yang termasuk dalam daftar pelarangan. Namun, kami tetap menyimpan bahan perpustakaan tersebut. Hal ini bukan berarti perpustakaan tidak boleh menyimpan, hanya saja kami tidak sirkulasi secara bebas, hanya ada pembatasan akses untuk peneliti saja dan tidak dapat dipinjam keluar dari perpustakaan. Perpustakaan mengartikan pelarangan tersebut hanya bersifat tidak boleh untuk disirkulasikan bahan perpustakaan secara bebas, namun perpustakaan tetap memiliki kewenangan dan hak untuk tetap menyimpan untuk kepentingan generasi mendatang. Sebetulnya di perpustakaan tidak ada larangan apapun untuk menyimpan bahan perpustakaan baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat karena suatu saat bahan perpustakaan akan berguna untuk kebutuhan penelitian. Sebagai contoh saat Rezim Soeharto, komunisme dianggap ideologi terlarang dan harus diberangus. Untuk bahan perpustakaan yang dianggap kontroversial kami simpan di Layanan Karantina yang ada di Perpustakaan BPAD Malioboro. Kemudian koleksi-koleksi tersebut disendirikan di lokasi yang terbatas. Untuk mengakses layanan karantina, dulu ketika masih Orde Baru harus melalui izin kepolisian dan perpustakaan. Sesudah Orba tumbang

kemudian digantikan Era Reformasi, maka perpustakaan memberikan kelonggaran akses ke layanan karantina dengan menghapus syarat izin dari kepolisian.

4. Dan bagaimana sikap perpustakaan terhadap bahan perpustakaan yang dilarang tersebut? Apakah tetap akan diakuisisi atau tidak?

Kami tetap mengakuisisi bahan perpustakaan yang dilarang tersebut. Karena ada perintah larangan terhadap bahan perpustakaan dari pihak berwenang, maka bahan perpustakaan tersebut tidak kami sirkulasi hanya kami simpan. Seperti koleksi deposit yang kami adakan karena ada peraturan undang-undang serah terima bahan perpustakaan. ini merupakan fungsi pelestarian bahan perpustakaan untuk disimpan dan boleh untuk diakses namun tidak dapat dibawa pulang. Dan melihat kondisi tertentu koleksi deposit dapat dibaca. Hal ini untuk mengantisipasi jika pihak penerbit ingin mencari dan mengkonfirmasi cetakannya apakah masih ada atau tidak. Dan kami hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut untuk penelitian. Kami tidak boleh memusnahkan atau membakar bahan perpustakaan tersebut karena buku bagi kami adalah aset yang harus dilestarikan. Perpustakaan tetap netral terhadap buku dari apapun penerbitnya, apakah dari penerbit umum ataupun penerbit alternatif. Kami mempertimbangkan hanya dari ISBN buku tersebut untuk diadakan. Karena naskah buku sebelum dicetak harus melalui verifikasi oleh Perpustakaan Nasional kemudian baru

mendapatkan nomor ISBN artinya buku tersebut sah untuk dicetak dan diakuisisi perpustakaan. Dan buku yang tidak ada ISBNnya pun tetap kami adakan. Namun jika ada buku yang satu ada ISBN dengan yang tidak, kami utamakan yang ada ISBNnya. Jadi untuk pelarangan-pelarangan terhadap suatu buku, kami tetap bersifat netral dan tidak terlalu ketat karena kami mengutamakan kebutuhan pengguna dan tidak terlalu memperhatikan dampak buku terhadap seseorang dan perpustakaan mengembalikan kemabali kepada pemustaka.

5. Apakah semua bahan perpustakaan di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY dapat diakses semua golongan masyarakat pengguna seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis?

Semua bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan boleh diakses oleh masyarakat. Karena kami perpustakaan umum kami tidak membedakan pemustaka dari golongan, pekerjaan, usia, agama, pekerjaan maupun pendidikan. Kebanyakan masyarakat yang mengakses Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka adalah mahasiswa dan pelajar. Selain, masyarakat umum yang dapat akses informasi, namun juga untuk masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel untuk dapat memanfaatkan informasi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka.

6. Apakah perpustakaan melindungi hak privasi (sesuai dengan kebutuhannya) pengguna dalam mengakses informasi di perpustakaan?

Kami tidak melarang atau menghormati pemustaka dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Dan kami tidak bertanggungjawab terhadap dampak buku kepada pemustaka. Karena perpustakaan adalah rumah belajar dan pusat informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan evaluasi koleksi yang dilakukan dengan melihat keterpakaian koleksi yang dipinjam.

7. Sebagai penyedia informasi, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah bebas dalam diseminasi(penyebaran) informasi?

Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka selama ini sudah menyediakan informasi secara bebas, kami hanya membatasi secara kuantitas dalam peminjaman koleksi. Selain itu, keterbatasan dalam penyebaran informasi karena faktor anggaran dalam pengadaan koleksi.

8. Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyebaran informasi?

Tantangan yang dihadapi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka yang pertama adalah faktor anggaran, kedua karena sedikitnya

penerbitan yang ada sehingga perpustakaan harus membeli ke luar daerah untuk memenuhi target penyerapan anggaran.

9. Sebagai ruang publik yang dapat diakses semua golongan masyarakat, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah memberikan ruang atau fasilitas bagi seluruh golongan masyarakat? Misalnya seperti ruang akses khusus anak-anak atau ruang khusus bagi kaum difabel?

Kami sudah menyediakan ruang dan fasilitas publik untuk dapat diakses, salah satunya dengan ruang seminar untuk bedah buku atau ruang pertemuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain masyarakat umum, kami juga menyediakan akses jalan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel dengan desai gedung yang mendukung seperti adanya *lift* bagi masyarakat difabel yang akan memanfaatkan layanan yang ada. Namun seharusnya ada komputer khusus difabel yang mendukung dalam mengakses informasi digital.

10. Apakah perpustakaan menentang sensor baik itu berasal dari pemerintah daerah/pusat?

Sedangkan terkait dengan kebijakan sensor, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Hal pertama adalah isi buku. Ketika pengembangan koleksi, kita bisa menyensor buku ini tidak layak untuk perpustakaan sekolah dasar. Seperti buku yang membahas seks

secara vulgar atau buku tentang ideologi-ideologi terlarang seperti ideologi komunisme. Namun, kebijakan pengembangan koleksi tersebut kembali kepada kebijakan perpustakaan masing-masing. Hal ini berbeda dengan perpustakaan umum yang memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk peneliti. Memang dulu perpustakaan memiliki keterbatasan akses kepada informasi tertentu karena desakan pemerintah orde baru. Namun perpustakaan tetap berusaha menyediakan akses informasi yang adil kepada pemustaka dengan layanan koleksi karantina. Layanan ini menyimpan dan menyediakan koleksi-koleksi terlarang seperti koleksi dengan muatan ideologi marxisme-leninisme. Salah satu tujuan layanan tersebut memberikan akses informasi kepada peneliti-peneliti yang mengkaji tentang ideologi komunisme. Kami menegaskan bahwa perpustakaan sebagai pusat informasi dan dokumentasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Tetapi, saat perpustakaan mengalami keterbatasan tersebut, kami melakukan kebijakan sensor dengan tidak memberikan akses secara menyeluruh kepada pemustaka hanya pengecualian seperti peneliti saja. Masalah pelarangan tersebut hampir meliputi keseluruhan aspek buku termasuk keterlibatan penulisnya juga dilarang untuk diakses kepada pemustaka. Kepercayaan kami sebagai penyedia informasi adalah tetap memberikan akses informasi secara adil dan perpustakaan tidak bisa disalahkan jika informasi tersebut akan berpengaruh kepada pembacanya. Dampak tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemustaka dalam memahami informasi yang mereka baca atau pelajari. Keterbatasan akses

informasi dan kebijakan sensor tersebut tergantung situasi dan kondisi sosial, budaya dan politik yang sedang berlangsung. Perpustakaan tidak melakukan sensor terhadap salah satu bahan perpustakaan dalam proses seleksi koleksi. Karena perpustakaan memiliki wewenang untuk menyimpan segala bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kecuali ada perintah khusus dari pihak berwenang untuk tidak diedarkan saja namun belum pernah ada kejadian larangan untuk tidak boleh menyimpan bahan perpustakaan.

11. Bagaimana sikap perpustakaan terhadap sensor (tindakan pelarangan dari lembaga atau kelompok tertentu atas koleksi perpustakaan)?

Semua informasi yang ada di perpustakaan tetap kami sampaikan akses kepada pemustaka dan perpustakaan tidak bertanggungjawab akan dampak informasi tersebut atau penyalahgunaan informasi tersebut oleh pemustaka.

12. Adakah usaha-usaha perpustakaan dalam mendukung kebebasan intelektual?

Kami mendukung kebebasan intelektual dengan gerakan literasi informasi kepada masyarakat dengan pendampingan langsung dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti perpustakaan memberikan pelatihan kewirausahaan atau perikanan yang

mengalami masalah pakan atau produksi ikan. Sedangkan pelbagai hal tentang kebebasan intelektual belum secara eksplisit dicantumkan dalam kebijakan pengembangan koleksi karena keterbatasan pengetahuan terkait dengan kebebasan intelektual. Sebetulnya, kebebasan intelektual ada seiring adanya kebijakan sensor. Kebebasan intelektual dipahami sebagai kebebasan berekspresi dan menghindari sensor. Selektor tidak boleh menyeleksi dan mengadakan koleksi berdasarkan selera pribadi dan perpustakaan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, kebebasan intelektual berawal dari laporan dokumen dari tim selektor dan bentuk kebebasan intelektual dalam kebijakan pengembangan koleksi berupa garis-garis besar kebebasan intelektual seperti menjamin ketaataazasan dalam proses seleksi dan deseleksi koleksi, membangun koleksi yang responsif dan seimbang. Kemudian menghindari pengaruh selektor tertentu dan bias atau menurut selera pribadi.

Perpustakaan mendukung kebebasan intelektual dengan merumuskan garis-garis besar yang berkaitan. Salah satunya sudah dirumuskan dalam kebijakan pengembangan koleksi. Di antaranya terdapat dalam tujuan kebijakan pengembangan koleksi. 1) kebijakan pengembangan koleksi menjadi pedoman bagi para pustakawan sehingga ketaataazasan dalam proses seleksi dan deseleksi terjamin, koleksi yang responsif dan seimbang terbentuk dan dana dimanfaatkan dengan sebijaksana mungkin. 2) menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai sejauh mana sasaran pengembangan koleksi telah tercapai 3) Menjelaskan

cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan selanjutnya, agar diketahui oleh staf perpustakaan, pemakai, administrator, dan dewan Pembina perpustakaan. 4) membantu para pustakawan menghadapi pengaduan berkenaan dengan bahan yang telah diseleksi atau ditolak. 5) Mengurangi pengaruh selector tertentu dan bias atau selera pribadi. 6) Menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat yang harus dilayani maupun pihak luar lain yang memerlukan informasi mengenai tujuan dan rencana pengembangan koleksi.

13. Apakah perpustakaan pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kebebasan berekspresi seperti dengan lembaga swadaya masyarakat tertentu?

Kami bekerjasama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia dan Dewan Perpustakaan Indonesia dalam menjalankan kepastakawanannya.

14. Walaupun dalam aktivitasnya dibiayai oleh masyarakat, bagaimana sikap perpustakaan jika ada individu atau lembaga yang mengintervensi dalam kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan? Misalnya melarang atau tidak merekomendasikan sebuah buku ?

Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pengembangan koleksi, sepenuhnya dilakukan oleh pihak selektor dan pustakawan dalam seluruh aktivitas pengadaan dan seleksi koleksi. Pemustaka boleh memberikan masukan dengan saran buku yang akan dibeli oleh perpustakaan. Kami berusaha menciptakan koleksi yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat secara adil dan beragam sesuai dengan masyarakat yang plural. Dalam pengadaan buku, kami mengutamakan subyek yang sedang populer atau diminati oleh pemustaka. Misalkan sedang ada gejolak politik maka perpustakaan akan mengutamakan bahan perpustakaan yang bemuatan politik. Namun jika situasi masyarakat kondusif, maka perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan tentang kewirausahaan.



Lampiran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Muhammad Rosyid Budiman

**Keterangan : Kasubid. Pengolahan dan Deposit Balai Layanan Perpustakaan
Grhatama Pustaka**

1. Dalam pengadaan koleksi, apakah latar belakang ideologi dan aktivitas politik penulis menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan koleksi?

Karena Perpustakaan Grhatama Pustaka (GTP) merupakan perpustakaan umum, karena itu tidak boleh dibatasi oleh apapun itu, apakah buku-buku kontroversial dan pada intinya semua buku kami usahakan untuk dilayankan kepada semua masyarakat, cuman permasalahannya memang ada buku yang perlu kehati-hatian untuk memilih maupun mendistribusikan kepada masyarakat, lebih menekankan pada buku-buku langka yang memuat data-data misalkan nama tokoh komunis /pki atau pelaku korupsi dan ini kami batasi tidak semua dapat mengakses, hanya peneliti yang boleh atau penegak hukum dsb, lebih kepada *safety* aja tidak semua dapat diakses seperti buku gurita cikeas, buku seperti ini akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hal ini kami batasi dan kami pikirkan ke hati-hatian dalam membeli dan kami membeli

ketika tensi situasi kondusif dalam masyarakat. Buku tersebut dibeli dan diadakan saat keadaan sudah kondusif. Dan tidak menimbulkan resarahan dalam masyarakat. Kami tetap memberikan akses buku-buku kontroversial tersebut kepada masyarakat, namun dengan batasan hanya pemustaka dengan peneliti saja.

2. Apakah sentimen pribadi, sentimen politik, agama, dan moral mempengaruhi selektor dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi? Ataukah dengan pertimbangan profesional?

Kita belum pernah memiliki atau mengoleksi buku-buku kontroversial, dalam pengadaan buku-buku tersebut kami akan adakan ketika situasi di masyarakat kondusif dan kebanyakan buku-buku tersebut ketika sudah dibeli dan dilayankan ke pemustaka yang terjadi tidak ada minat dari mereka untuk meminjamnya, yang terpenting kita tetap mengantisipasi ketika akan mengadakan dan membeli buku-buku yang cenderung kontroversial. Untuk buku-buku lain seperti buku agama, walupun kami (selektor) semua beragama Islam, tidak lantas memilih buku agama Islam saja, namun semua agama yang ada di Indonesia. Selama ini, hanya agama Islam dan Kristen yang memiliki penerbit yang dapat dibeli oleh perpustakaan. Untuk agama lainnya kebanyakan hanya berupa pamphlet atau brosur cetakan dari yayasan yang tidak dapat dibeli oleh perpustakaan, namun diterima sebagai hadiah. Kami juga berusaha memenuhi dalam keilmuan agama dengan mengadakan membeli buku-buku

aliran keagamaan. Dari yang berisi ajaran fundamental hingga ke liberal. Contoh dalam dalam agama Islam, kami membeli buku-buku berjudul Syiah, Wahabi, Sunni.

3. Dan apakah dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi perpustakaan mengakomodir atau mempertimbangkan larangan akan bahan perpustakaan tertentu yang diajukan oleh pihak atau lembaga tertentu? misalkan saja Kejaksaan Agung

Kita harus menunjung nilai netralitas terhadap SARA, politik, ideologi dalam proses seleksi koleksi. Kami melakukan kegiatan seleksi dengan baik tidak ada tendesi pada latar belakang dari informasi atau buku tertentu. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemilihan dan seleksi koleksi adalah keterbatasan daftar referensi buku dan berdasarkan asumsi pustakawan selector dalam pemilihan dan seleksi koleksi. Misalnya dalam seleksi buku agama nasrani, karena semua selektor Beragama Islam, maka kesulitan dalam rekomendasi referensi buku yang akan diadakan dan dibeli. Selektor belum sepenuhnya menguasai dalam pemilihan koleksi yang akan menjadi koleksi perpustakaan /isi buku yang akan diseleksi. Kita tidak mengklaim suatu buku baik/buruk dan semua buku dengan latar belakang apapun, kami usahakan untuk didistribusikan kepada pemustaka. dan kita tetap menjunjung tinggi kenetralitas dalam pengadaan dan seleksi koleksi.

4. Dan bagaimana sikap perpustakaan terhadap bahan perpustakaan yang dilarang tersebut? Apakah tetap akan diakuisisi atau tidak?

Tidak ada pengaruh sentimen dalam proses seleksi oleh selektor. Hanya permasalahannya pada kemampuan selector pada bidang atau subyek yang kurang mendalam. Semua buku dengan latar belakang apapun tetap kami usahakan untuk diadakan dan diseleksi. Penerbit selama ini kebanyakan buku-buku Agama Islam dan Kristen, sedangkan untuk agama lain, misalnya Budha, kami mendapatkannya dalam bentuk hadiah. Untuk buku agama selain Islam dan Kristen kami tidak punya referensi dari penerbit. Buku dengan latar belakang tertentu seperti buku berisi ajaran Ahmadiyah, tetap kami adakan, jika ada kontroversi terhadap koleksi, maka koleksi tersebut akan kami tarik dari rak buku. Selain koleksi umum, kami juga menyediakan koleksi untuk masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Selama ini belum pernah ada protes terhadap koleksi perpustakaan. Jika terdapat keluhan/protes, kita ajak diskusi terlebih dahulu dan mencari permasalahan serta pemecahan masalah atas permasalahan protes atau keluhan. Belum ada protes dari pihak manapun atas koleksi perpustakaan dan kami berhati-hati dengan buku-buku kontroversi. Jika terdapat pelarangan buku dari lembaga Negara seperti Kejaksaan Agung untuk tidak boleh beredar, hal itu bukan suatu batasan, namun aturan dari pusat jika terdapat pelarangan buku, maka kami tidak bisa mengadakan buku tersebut. Jika buku kontroversial tersebut pada masanya dilarang, namun dengan perkembangan zaman dan situasi kondusif dalam masyarakat, perpustakaan

akan mempertimbangkan buku kontroversial tersebut untuk diadakan. Sebenarnya, perpustakaan lebih memprioritaskan buku-buku lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses seleksi koleksi, perpustakaan menghindari buku-buku yang menimbulkan kontroversial dan menimbulkan resiko terhadap perpustakaan. Kedua, perpustakaan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pemustaka dan perpustakaan menunda buku-buku kontroversial setelah situasi kondusif dalam masyarakat. Dalam seleksi koleksi, secara administrasi prosedur pengadaan koleksi harus melalui penerbit atau mengajukan daftar rekomendasi penerbit kepada Perpustakaan Nasional. Terkait prosedur administrasi yang mengharuskan perpustakaan dalam pengadaan koleksi melalui penerbit, hal ini juga berhubungan dengan buku-buku kontroversial yang memang diterbitkan oleh penerbit yang tidak resmi yang tidak memiliki ISBN atau oleh penerbit semua produk buku ditarik dari pasar sehingga tidak ada barang, maka perpustakaan tidak dapat membeli atau mengadakan buku tersebut.

5. Apakah semua bahan perpustakaan di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY dapat diakses semua golongan masyarakat pengguna seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis?

Perpustakaan adalah tempat untuk belajar dan menjunjung prinsip netralitas terhadap segala aspek buku. Perpustakaan merupakan ruang belajar

Tidak ada batasan untuk mengakses segala informasi dan kami berusaha memenuhi semua lapisan masyarakat seperti memberikan hak kepada difabel.

6. Apakah perpustakaan melindungi hak privasi (sesuai dengan kebutuhannya) pengguna dalam mengakses informasi di perpustakaan?

Tidak ada pembatasan akses informasi di perpustakaan dan tidak memandang dari aspek latar belakang sosial pemustaka. semua lapisan masyarakat dapat dan berhak mengakses segala informasi yang ada di perpustakaan. Kami memberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mendiskriminasikan salah satu golongan masyarakat. Pembatasan hanya pada tata letak ruangan. Ruangan khusus anak-anak terletak paling bawah, agar tercipta situasi yang kondusif. Untuk ruangan dewasa atau koleksi umum dan ruangan bagi peneliti terletak paling atas, agar tercipta kenyamanan dan kondusif.

7. Sebagai penyedia informasi, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah bebas dalam diseminasi (penyebaran) informasi?

Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan tersebut dengan memberikan layanan perpustakaan keliling ke daerah-daerah. Selain itu, perpustakaan mengembangkan system katalog online untuk membantu mencari

dan menelusuri buku yang akan dicari tanpa datang ke perpustakaan. Perpustakaan juga mengembangkan perpustakaan elektronik yaitu *ijogja*.

8. Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyebaran informasi?

Tantangan yang dihadapi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka yang pertama adalah faktor anggaran, kedua karena sedikitnya penerbitan yang ada sehingga perpustakaan harus membeli ke luar daerah untuk memenuhi target penyerapan anggaran.

9. Sebagai ruang publik yang dapat diakses semua golongan masyarakat, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah memberikan ruang atau fasilitas bagi seluruh golongan masyarakat? Misalnya seperti ruang akses khusus anak-anak atau ruang khusus bagi kaum difabel?

Kami sudah menyediakan ruang dan fasilitas publik untuk dapat diakses, salah satunya dengan ruang seminar untuk bedah buku atau ruang pertemuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain masyarakat umum, kami juga menyediakan akses jalan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel dengan desai gedung yang mendukung seperti adanya *lift* bagi masyarakat difabel yang akan memanfaatkan layanan yang ada. Namun seharusnya ada komputer khusus difabel yang mendukung dalam mengakses informasi digital.

10. Apakah perpustakaan menentang sensor baik itu berasal dari pemerintah daerah/pusat?

Perpustakaan tidak melakukan sensor terhadap salah satu bahan perpustakaan dalam proses seleksi koleksi. Karena perpustakaan memiliki wewenang untuk menyimpan segala bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kecuali ada perintah khusus dari pihak berwenang untuk tidak diedarkan saja namun belum pernah ada kejadian larangan untuk tidak boleh menyimpan bahan perpustakaan.

11. Bagaimana sikap perpustakaan terhadap sensor (tindakan pelarangan dari lembaga atau kelompok tertentu atas koleksi perpustakaan)?

Semua informasi yang ada di perpustakaan tetap kami sampaikan akses kepada pemustaka. Selama ini belum pernah ada protes terhadap koleksi perpustakaan. Jika terdapat keluhan/protes, kita ajak diskusi terlebih dahulu dan mencari permasalahan serta pemecahan masalah atas permasalahan protes atau keluhan. Belum ada protes dari pihak manapun atas koleksi perpustakaan dan kami berhati-hati dengan buku-buku kontroversi. Jika terdapat pelarangan buku dari lembaga Negara seperti Kejaksaan Agung untuk tidak boleh beredar, hal itu bukan suatu batasan, namun aturan dari pusat jika terdapat pelarangan buku, maka kami tidak bisa mengadakan buku tersebut. Jika buku kontroversial tersebut pada masanya dilarang, namun dengan perkembangan zaman dan

situasi kondusif dalam masyarakat, perpustakaan akan mempertimbangkan buku kontroversial tersebut untuk diadakan. Sebenarnya, perpustakaan lebih memprioritaskan buku-buku lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

12. Adalah usaha-usaha perpustakaan dalam mendukung kebebasan intelektual?

Kita harus menunjung nilai netralitas terhadap SARA, politik, ideologi dalam proses seleksi koleksi. Kami melakukan kegiatan seleksi dengan baik tidak ada tendesi pada latar belakang dari informasi atau buku tertentu. Dan memberikan dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

13. Apakah perpustakaan pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kebebasan berekspresi seperti dengan lembaga swadaya masyarakat tertentu?

Perpustakaan selama ini koordinasi dengan organisasi perpustakaan di antaranya seperti: Ikatan Pustakawan Indonesia dan Dewan Perpustakaan Indonesia dalam menjalankan kepastakawanannya.

14. Walaupun dalam aktivitasnya dibiayai oleh masyarakat, bagaimana sikap perpustakaan jika ada individu atau lembaga yang mengintervensi dalam kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan? Misalnya melarang atau tidak merekomendasikan sebuah buku ?

Perpustakaan menjunjung netralitas dalam pengembangan koleksi dan dengan pertimbangan profesional berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pengembangan koleksi, sepenuhnya dilakukan oleh pihak selektor dan pustakawan dalam seluruh aktivitas pengadaan dan seleksi koleksi. Pemustaka boleh memberikan masukan dengan saran buku yang akan dibeli oleh perpustakaan. Kami berusaha menciptakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara adil dan beragam sesuai dengan masyarakat yang plural. Dalam pengadaan buku, kami mengutamakan subyek yang sedang populer atau diminati oleh pemustaka. Misalkan sedang ada gejolak politik maka perpustakaan akan mengutamakan bahan perpustakaan yang bemuatan politik. Namun jika situasi masyarakat kondusif, maka perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan tentang kewirausahaan. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan tersebut dengan memberikan layanan perpustakaan keliling ke daerah-daerah. Selain itu, perpustakaan mengembangkan system katalog online untuk membantu mencari dan menelusuri buku yang akan dicari tanpa datang ke perpustakaan. Perpustakaan juga mengembangkan perpustakaan elektronik yaitu *ijogja*.



Lampiran

Reduksi, Display, dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Nama : Drs. Budiono, SIP

Keterangan : Pustakawan Madya BPAD DIY

No	Pertanyaan	Jawaban	Simpulan
1.	Dalam pengadaan koleksi, apakah latar belakang ideologi dan aktivitas politik penulis menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan koleksi?	Dalam pengembangan koleksi kami memperhatikan latar belakang penulisan sebuah buku. Namun tidak sepanjang zaman tergantung situasi kondisi politik dan keamanan di masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam seleksi koleksi. Misalnya seperti penulis Pramodya Ananta Toer (Pram) agak kita negatifykan seperti beberapa tahun silam. Atau ada buku-buku untuk sekolah dasar yang dicurigai memuat bahasa atau seks yang belum sesuai dengan kebutuhan anak-anak tidak kami adakan atau seleksi. Selama ini perpustakaan bukan menjadi penghalang penulis dan penerbit untuk menerbitkan sebuah buku. Perpustakaan sebagai pusat informasi sehingga jika ada pelarangan sebuah buku dari pihak berwenang, perpustakaan tetap memiliki wewenang untuk menyimpan informasi. Kami masih menyimpan koleksi-koleksi ajaran komunisme, marxisme-leninisme yang bertentangan dengan ideologi bangsa dan belum pernah ada keluhan atau pelarangan/bredel terkait koleksi-koleksi semacam itu karena perpustakaan memiliki hak sebagai tempat menyimpan, sebagai tempat pendidikan, penelitian, pusat informasi, pelestarian dan sebagai tempat rekreasi intelektual. Barangkali, dokumen-dokumen bahan perpustakaan yang terlarang menjadi area penelitian.	Latar belakang penulis menjadi pertimbangan dalam seleksi dan akuisisi bahan perpustakaan, namun bersifat temporal tergantung situasi dan kondisi di masyarakat.
2.	Apakah sentimen pribadi, sentimen politik, agama, dan moral mempengaruhi selektor dalam proses	Kita sebagai pihak selektor harus bersikap adil dan profesional karena kita mengadakan dan menyeleksi bahan perpustakaan untuk kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pribadi	Selektor tidak terpengaruh dengan sentimen pribadi dan menyeleksi bahan perpustakaan secara

	pengadaan dan seleksi koleksi? Ataukah dengan pertimbangan profesional?	selektor maupun pertimbangan sentimen. Kami berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat luas dengan memenuhi kebutuhan dari anak-anak hingga dewasa. Untuk bahan perpustakaan anak-anak dan dewasa, kami menyesuaikan dan menempatkannya secara terpisah, misalnya terdapat bahan perpustakaan yang berisi pornografi atau pendidikan seks, tentunya hal ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dewasa dan kami letakkan di layanan umum yang tidak terjangkau anak-anak. Selektor tidak boleh terlalu berambisi dengan kemauannya dalam pengadaan bahan perpustakaan. Ada kriteria-kriteria selektor yang harus dipenuhi di antaranya; a. Harus menguasai perbukuan; b. Harus menguasai bibliografi; c. Harus berfikiran luas.	adil dan profesional menyesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
3.	Dan apakah dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi perpustakaan mengkomodir atau mempertimbangkan larangan akan bahan perpustakaan tertentu yang diajukan oleh pihak atau lembaga tertentu? misalkan saja Kejaksaan Agung	Kita perhatikan itu, jika ada larangan dari lembaga negara dengan tidak mensirkulasikan bahan perpustakaan yang termasuk dalam daftar pelarangan. Namun, kami tetap menyimpan bahan perpustakaan tersebut. Hal ini bukan berarti perpustakaan tidak boleh menyimpan, hanya saja kami tidak sirkulasikan secara bebas, hanya ada pembatasan akses untuk peneliti saja dan tidak dapat dipinjam keluar dari perpustakaan. Perpustakaan mengartikan pelarangan tersebut hanya bersifat tidak boleh untuk disirkulasikan bahan perpustakaan secara bebas, namun perpustakaan tetap memiliki kewenangan dan hak untuk tetap menyimpan untuk kepentingan generasi mendatang. Sebetulnya di perpustakaan tidak ada larangan apapun untuk menyimpan bahan perpustakaan baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat karena suatu saat bahan perpustakaan akan berguna untuk kebutuhan penelitian. Sebagai contoh saat Rezim Soeharto, komunisme dianggap ideologi terlarang dan harus diberangus. Untuk bahan perpustakaan yang dianggap kontroversial kami simpan di	Perpustakaan tetap menjalankan fungsi sebagai pelestarian bahan perpustakaan yang dianggap terlarang sekalipun, namun tidak menyebarkan secara luas hanya untuk kepentingan penelitian saja.

		Layanan Karantina yang ada di Perpustakaan BPAD Malioboro. Kemudian koleksi-koleksi tersebut disendirikan di lokasi yang terbatas. Untuk mengakses layanan karantina, dulu ketika masih Orde Baru harus melalui izin kepolisian dan perpustakaan. Sesudah Orba tumbang kemudian digantikan Era Reformasi, maka perpustakaan memberikan kelonggaran akses ke layanan karantina dengan menghapus syarat izin dari kepolisian.	
4.	Dan bagaimana sikap perpustakaan terhadap bahan perpustakaan yang dilarang tersebut? Apakah tetap akan diakuisisi atau tidak?	Kami tetap mengakuisisi bahan perpustakaan yang dilarang tersebut. Karena ada perintah larangan terhadap bahan perpustakaan dari pihak berwenang, maka bahan perpustakaan tersebut tidak kami sirkulasi hanya kami simpan. Seperti koleksi deposit yang kami adakan karena ada peraturan undang-undang serah terima bahan perpustakaan. ini merupakan fungsi pelestarian bahan perpustakaan untuk disimpan dan boleh untuk diakses namun tidak dapat dibawa pulang. Dan melihat kondisi tertentu koleksi deposit dapat dibaca. Hal ini untuk mengantisipasi jika pihak penerbit ingin mencari dan mengkonfirmasi cetakannya apakah masih ada atau tidak. Dan kami hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tersebut untuk penelitian. Kami tidak boleh memusnahkan atau membakar bahan perpustakaan tersebut karena buku bagi kami adalah aset yang harus dilestarikan. Perpustakaan tetap netral terhadap buku dari apapun penerbitnya, apakah dari penerbit umu ataupun penerbit alternatif. Kami mempertimbangkan hanya dari ISBN buku tersebut untuk diadakan. Karena naskah buku sebelum dicetak harus melalui verifikasi oleh Perpustakaan Nasional kemudian baru mendapatkan nomor ISBN artinya buku tersebut sah untuk dicetak dan diakuisisi perpustakaan. Dan buku yang tidak ada ISBNnya pun tetap kami adakan. Namun jika ada buku yang satu ada ISBN dengan	Perpustakaan tetap mengakuisisi bahan perpustakaan yang tergolong terlarang atau kontroversional. Dan perpustakaan bersifat netral terhadap buku dari apapun penerbitnya.

		yang tidak, kami utamakan yang ada ISBNnya. Jadi untuk pelarangan-pelarangan terhadap suatu buku, kami tetap bersifat netral dan tidak terlalu ketat karena kami mengutamakan kebutuhan pengguna dan tidak terlalu memperhatikan dampak buku terhadap seseorang dan perpustakaan mengembalikan kemabali kepada pemustaka.	
5.	Apakah semua bahan perpustakaan di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY dapat diakses semua golongan masyarakat pengguna seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis?	Semua bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan boleh diakses oleh masyarakat. Karena kami perpustakaan umum kami tidak membedakan pemustaka dari golongan, pekerjaan, usia, agama, pekerjaan maupun pendidikan. Kebanyakan masyarakat yang mengakses Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka adalah mahasiswa dan pelajar. Selain, masyarakat umum yang dapat akses informasi, namun juga untuk masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel untuk dapat memanfaatkan informasi di Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka.	Semua jenis bahan perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat secara bebas tanpa memandang latar belakang sosialnya.
6.	Apakah perpustakaan melindungi hak privasi (sesuai dengan kebutuhannya) pengguna dalam mengakses informasi di perpustakaan?	Kami tidak melarang atau menghormati pemustaka dalam mengakses informasi yang ada di perpustakaan. Dan kami tidak bertanggungjawab terhadap dampak buku kepada pemustaka. Karena perpustakaan adalah rumah belajar dan pusat informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan evaluasi koleksi yang dilakukan dengan melihat keterpakaian koleksi yang dipinjam.	Perpustakaan tidak melarang atau membatasi pemustaka dalam mengakses informasi karena perpustakaan merupakan rumah belajar dan pusat informasi yang dapat diakses oleh siapa saja.
7.	Sebagai penyedia informasi, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah bebas dalam diseminasi(penyebaran) informasi?	Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka selama ini sudah menyediakan informasi secara bebas, kami hanya membatasi secara kuantitas dalam peminjaman koleksi. Selain itu, keterbatasan dalam penyebaran informasi karena faktor anggaran dalam pengadaan koleksi.	Perpustakaan bebas dalam menyebarkan informasi.

8.	Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyebaran informasi?	Tantangan yang dihadapi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka yang pertama adalah faktor anggaran, kedua karena sedikitnya penerbitan yang ada sehingga perpustakaan harus membeli ke luar daerah untuk memenuhi target penyerapan anggaran.	Kendala yang dihadapi dalam penyebaran informasi adalah anggaran yang terbatas.
9.	Sebagai ruang publik yang dapat diakses semua golongan masyarakat, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah memberikan ruang atau fasilitas bagi seluruh golongan masyarakat? Misalnya seperti ruang akses khusus anak-anak atau ruang khusus bagi kaum difabel?	Kami sudah menyediakan ruang dan fasilitas publik untuk dapat diakses, salah satunya dengan ruang seminar untuk bedah buku atau ruang pertemuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain masyarakat umum, kami juga menyediakan akses jalan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel dengan desain gedung yang mendukung seperti adanya <i>lift</i> bagi masyarakat difabel yang akan memanfaatkan layanan yang ada. Namun seharusnya ada komputer khusus difabel yang mendukung dalam mengakses informasi digital.	Semua layanan perpustakaan dapat diakses oleh siapapun.
10.	Apakah perpustakaan menentang sensor baik itu berasal dari pemerintah daerah/pusat?	Sedangkan terkait dengan kebijakan sensor, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Hal pertama adalah isi buku. Ketika pengembangan koleksi, kita bisa menyensor buku ini tidak layak untuk perpustakaan sekolah dasar. Seperti buku yang membahas seks secara vulgar atau buku tentang ideologi-ideologi terlarang seperti ideologi komunisme. Namun, kebijakan pengembangan koleksi tersebut kembali kepada kebijakan perpustakaan masing-masing. Hal ini berbeda dengan perpustakaan umum yang memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk peneliti. Memang dulu perpustakaan memiliki keterbatasan akses kepada informasi tertentu karena desakan pemerintah orde baru. Namun perpustakaan tetap berusaha menyediakan akses informasi yang adil kepada pemustaka dengan layanan koleksi karantina. Layanan ini menyimpan dan menyediakan koleksi-koleksi terlarang seperti koleksi dengan muatan ideologi	Perpustakaan Grhatama Pustaka menentang sensor dengan tetap menjalankan fungsi sebagai pelestari bahan perpustakaan dengan tetap mengadakan bahan perpustakaan yang kontroversial maupun terlarang.

		marxisme-leninisme. Salah satu tujuan layanan tersebut memberikan akses informasi kepada peneliti-peneliti yang mengkaji tentang ideologi komunisme. Kami menegaskan bahwa perpustakaan sebagai pusat informasi dan dokumentasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Tetapi, saat perpustakaan mengalami keterbatasan tersebut, kami melakukan kebijakan sensor dengan tidak memberikan akses secara menyeluruh kepada pemustaka hanya pengecualian seperti peneliti saja. Masalah pelarangan tersebut hampir meliputi keseluruhan aspek buku termasuk keterlibatan penulisnya juga dilarang untuk diakses kepada pemustaka. Kepercayaan kami sebagai penyedia informasi adalah tetap memberikan akses informasi secara adil dan perpustakaan tidak bisa disalahkan jika informasi tersebut akan berpengaruh kepada pembacanya. Dampak tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemustaka dalam memahami informasi yang mereka baca atau pelajari. Keterbatasan akses informasi dan kebijakan sensor tersebut tergantung situasi dan kondisi sosial, budaya dan politik yang sedang berlangsung. Perpustakaan tidak melakukan sensor terhadap salah satu bahan perpustakaan dalam proses seleksi koleksi. Karena perpustakaan memiliki wewenang untuk menyimpan segala bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kecuali ada perintah khusus dari pihak berwenang untuk tidak diedarkan saja namun belum pernah ada kejadian larangan untuk tidak boleh menyimpan bahan perpustakaan.	
11.	Bagaimana sikap perpustakaan terhadap sensor (tindakan pelarangan dari lembaga atau kelompok tertentu atas koleksi perpustakaan)?	Semua informasi yang ada di perpustakaan tetap kami sampaikan akses kepada pemustaka dan perpustakaan tidak bertanggungjawab akan dampak informasi tersebut atau penyalahgunaan informasi tersebut oleh pemustaka.	Perpustakaan tetap menyimpan bahan perpustakaan terlarang namun menyediakan akses terbatas untuk penelitian

12.	Adalah usaha-usaha perpustakaan dalam mendukung kebebasan intelektual?	Kami mendukung kebebasan intelektual dengan gerakan literasi informasi kepada masyarakat dengan pendampingan langsung dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti perpustakaan memberikan pelatihan kewirausahaan atau perikanan yang mengalami masalah pakan atau produksi ikan. Sedangkan pelbagai hal tentang kebebasan intelektual belum secara eksplisit dicantumkan dalam kebijakan pengembangan koleksi karena keterbatasan pengetahuan terkait dengan kebebasan intelektual. Sebetulnya, kebebasan intelektual ada seiring adanya kebijakan sensor. Kebebasan intelektual dipahami sebagai kebebasan berekspresi dan menghindari sensor. Selektor tidak boleh menyeleksi dan mengadakan koleksi berdasarkan selera pribadi dan perpustakaan harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sebenarnya, kebebasan intelektual berawal dari laporan dokumen dari tim selektor dan bentuk kebebasan intelektual dalam kebijakan pengembangan koleksi berupa garis-garis besar kebebasan intelektual seperti menjamin ketaatan dalam proses seleksi dan deseleksi koleksi, membangun koleksi yang responsif dan seimbang. Kemudian menghindari pengaruh selektor tertentu dan bias atau menurut selera pribadi. Perpustakaan mendukung kebebasan intelektual dengan merumuskan garis-garis besar yang berkaitan. Salah satunya sudah dirumuskan dalam kebijakan pengembangan koleksi. Di antaranya terdapat dalam tujuan kebijakan pengembangan koleksi. 1) kebijakan pengembangan koleksi menjadi pedoman bagi para pustakawan sehingga ketaatan dalam proses seleksi dan deseleksi terjamin, koleksi yang responsif dan seimbang terbentuk dan dana dimanfaatkan dengan sebijaksana mungkin. 2) menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai sejauh mana sasaran pengembangan koleksi telah tercapai	Perpustakaan mendukung kebebasan intelektual dengan merumuskan garis-garis besar kebebasan intelektual dalam kebijakan pengembangan koleksi.
-----	---	--	---

		3) Menjelaskan cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan selanjutnya, agar diketahui oleh staf perpustakaan, pemakai, administrator, dan dewan Pembina perpustakaan. 4) membantu para pustakawan menghadapi pengaduan berkenaan dengan bahan yang telah diseleksi atau ditolak. 5) Mengurangi pengaruh selector tertentu dan bias atau selera pribadi. 6) Menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat yang harus dilayani maupun pihak luar lain yang memerlukan informasi mengenai tujuan dan rencana pengembangan koleksi.	
13.	Apakah perpustakaan pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kebebasan berekspresi seperti dengan lembaga swadaya masyarakat tertentu?	Kami bekerjasama dengan Ikatan Pustakawan Indonesia dan Dewan Perpustakaan Indonesia dalam menjalankan kepastakawanannya.	Perpustakaan bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam aktivitas pengembangan perpustakaan
14.	Walaupun dalam aktivitasnya dibiayai oleh masyarakat, bagaimana sikap perpustakaan jika ada individu atau lembaga yang mengintervensi dalam kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan? Misalnya melarang atau tidak merekomendasikan sebuah buku ?	Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pengembangan koleksi, sepenuhnya dilakukan oleh pihak selektor dan pustakawan dalam seluruh aktivitas pengadaan dan seleksi koleksi. Pemustaka boleh memberikan masukan dengan saran buku yang akan dibeli oleh perpustakaan. Kami berusaha menciptakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara adil dan beragam sesuai dengan masyarakat yang plural. Dalam pengadaan buku, kami mengutamakan subyek yang sedang populer atau diminati oleh pemustaka. Misalkan sedang ada gejolak politik maka perpustakaan akan mengutamakan bahan perpustakaan yang bemuatan politik. Namun jika situasi masyarakat kondusif, maka perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan tentang kewirausahaan.	Perpustakaan sudah melakukan netralitas dalam pengadaan dan seleksi bahan perpustakaan.

--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

Reduksi, Display, dan Kesimpulan Hasil Wawancara

Nama : Muhammad Rosyid Budiman

Keterangan : Kasubid. Pengolahan dan Deposit Balai Layanan
Perpustakaan Grhatama Pustaka

No	Pertanyaan	Jawaban	Simpulan
1.	Dalam pengadaan koleksi, apakah latar belakang ideologi dan aktivitas politik penulis menjadi pertimbangan dalam proses pengadaan koleksi?	Karena Perpustakaan Grhatama Pustaka (GTP) merupakan perpustakaan umum, karena itu tidak boleh dibatasi oleh apapun itu, apakah buku-buku kontroversial dan pada intinya semua buku kami usahakan untuk dilayankan kepada semua masyarakat, cuman permasalahannya memang ada buku yang perlu kehati-hatian untuk memilih maupun mendistribusikan kepada masyarakat, lebih menekankan pada buku-buku langka yang memuat data-data misalkan nama tokoh komunis /pki atau pelaku korupsi dan ini kami batasi tidak semua dapat mengakses, hanya peneliti yang boleh atau penegak hukum dsb, lebih kepada <i>safety</i> aja tidak semua dapat diakses seperti buku gurita cikeas, buku seperti ini akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, hal ini kami batasi dan kami pikirkan ke hati-hatian dalam membeli dan kami membeli ketika tensi situasi kondusif dalam masyarakat. Buku tersebut dibeli dan diadakan saat keadaan sudah kondusif. Dan tidak menimbulkan resarahan dalam masyarakat. Kami tetap memberikan akses buku-buku kontroversial tersebut kepada masyarakat, namun dengan batasan hanya pemustaka dengan peneliti saja.	Perpustakaan mempertimbangkan latar belakang penulis, namun tergantung situasi sosial dan politik.
2.	Apakah sentimen pribadi, sentimen politik, agama, dan moral mempengaruhi selektor dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi? Ataukah dengan pertimbangan	Kita belum pernah memiliki atau mengoleksi buku-buku kontroversial, dalam pengadaan buku-buku tersebut kami akan adakan ketika situasi di masyarakat kondusif dan kebanyakan buku-buku tersebut ketika sudah dibeli dan dilayankan ke pemustaka yang terjadi tidak ada minat dari	Perpustakaan berkomitmen untuk netral terhadap apapun bahan perpustakaan dan mengutamakan kebutuhan pemustaka.

	profesional?	mereka untuk meminjamnya, yang terpenting kita tetap mengantisipasi ketika akan mengadakan dan membeli buku-buku yang cenderung kontroversial. Untuk buku-buku lain seperti buku agama, walupun kami (selektor) semua beragama Islam, tidak lantas memilih buku agama Islam saja, namun semua agama yang ada di Indonesia. Selama ini, hanya agama Islam dan Kristen yang memiliki penerbit yang dapat dibeli oleh perpustakaan. Untuk agama lainnya kebanyakan hanya berupa pamphlet atau brosur cetakan dari yayasan yang tidak dapat dibeli oleh perpustakaan, namun diterima sebagai hadiah. Kami juga berusaha memenuhi dalam keilmuan agama dengan mengadakan membeli buku-buku aliran keagamaan. Dari yang berisi ajaran fundamental hingga ke liberal. Contoh dalam dalam agama Islam, kami membeli buku-buku berjudul Syiah, Wahabi, Sunni.	
3.	Dan apakah dalam proses pengadaan dan seleksi koleksi perpustakaan mengakomodir atau mempertimbangkan larangan akan bahan perpustakaan tertentu yang diajukan oleh pihak atau lembaga tertentu? misalkan saja Kejaksaan Agung	Kita harus menunjung nilai netralitas terhadap SARA, politik, ideologi dalam proses seleksi koleksi. Kami melakukan kegiatan seleksi dengan baik tidak ada tendesi pada latar belakang dari informasi atau buku tertentu. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemilihan dan seleksi koleksi adalah keterbatasan daftar referensi buku dan berdasarkan asumsi pustakawan selector dalam pemilihan dan seleksi koleksi. Misalnya dalam seleksi buku agama nasrani, karena semua selektor Beragama Islam, maka kesulitan dalam rekomendasi referensi buku yang akan diadakan dan dibeli. Selektor belum sepenuhnya menguasai dalam pemilihan koleksi yang akan menjadi koleksi perpustakaan /isi buku yang akan diseleksi. Kita tidak mengklaim suatu buku baik/buruk dan semua buku dengan latar belakang apapun, kami usahakan untuk didistribusikan kepada pemustaka. dan kita tetap menjunjung tinggi kenetralitas dalam pengadaan dan seleksi koleksi.	Perpustakaan tidak bertendensi atau bias dalam proses seleksi dan pengadaan bahan perpustakaan

4.	Dan bagaimana sikap perpustakaan terhadap bahan perpustakaan yang dilarang tersebut? Apakah tetap akan diakuisisi atau tidak?	Tidak ada pengaruh sentimen dalam proses seleksi oleh selektor. Hanya permasalahannya pada kemampuan selector pada bidang atau subyek yang kurang mendalam. Semua buku dengan latar belakang apapun tetap kami usahakan untuk diadakan dan diseleksi. Penerbit selama ini kebanyakan buku-buku Agama Islam dan Kristen, sedangkan untuk agama lain, misalnya Budha, kami mendapatkannya dalam bentuk hadiah. Untuk buku agama selain Islam dan Kristen kami tidak punya referensi dari penerbit. Buku dengan latar belakang tertentu seperti buku berisi ajaran Ahmadiyah, tetap kami adakan, jika ada kontroversi terhadap koleksi, maka koleksi tersebut akan kami tarik dari rak buku. Selain koleksi umum, kami juga menyediakan koleksi untuk masyarakat berkebutuhan khusus atau difabel. Selama ini belum pernah ada protes terhadap koleksi perpustakaan. Jika terdapat keluhan/protes, kita ajak diskusi terlebih dahulu dan mencari permasalahan serta pemecahan masalah atas permasalahan protes atau keluhan. Belum ada protes dari pihak manapun atas koleksi perpustakaan dan kami berhati-hati dengan buku-buku kontroversi. Jika terdapat pelarangan buku dari lembaga Negara seperti Kejaksaan Agung untuk tidak boleh beredar, hal itu bukan suatu batasan, namun aturan dari pusat jika terdapat pelarangan buku, maka kami tidak bisa mengadakan buku tersebut. Jika buku kontroversial tersebut pada masanya dilarang, namun dengan perkembangan zaman dan situasi kondusif dalam masyarakat, perpustakaan akan mempertimbangkan buku kontroversial tersebut untuk diadakan. Sebenarnya, perpustakaan lebih memprioritaskan buku-buku lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses seleksi koleksi, perpustakaan menghindari buku-buku yang menimbulkan kontroversial dan menimbulkan resiko terhadap	Dalam pengadaan dan seleksi bahan perpustakaan melakukan secara profesional atau tidak memiliki bias tertentu pada bahan perpustakaan tertentu.
----	--	---	--

		perpustakaan. Kedua, perpustakaan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pemustaka dan perpustakaan menunda buku-buku kontroversial setelah situasi kondusif dalam masyarakat. Dalam seleksi koleksi, secara administrasi prosedur pengadaan koleksi harus melalui penerbit atau mengajukan daftar rekomendasi penerbit kepada Perpustakaan Nasional. Terkait prosedur administrasi yang mengharuskan perpustakaan dalam pengadaan koleksi melalui penerbit, hal ini juga berhubungan dengan buku-buku kontroversial yang memang diterbitkan oleh penerbit yang tidak resmi yang tidak memiliki ISBN atau oleh penerbit semua produk buku ditarik dari pasar sehingga tidak ada barang, maka perpustakaan tidak dapat membeli atau mengadakan buku tersebut.	
5.	Apakah semua bahan perpustakaan di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY dapat diakses semua golongan masyarakat pengguna seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis?	Perpustakaan adalah tempat untuk belajar dan menjunjung prinsip netralitas terhadap segala aspek buku. Perpustakaan merupakan ruang belajar Tidak ada batasan untuk mengakses segala informasi dan kami berusaha memenuhi semua lapisan masyarakat seperti memberikan hak kepada difabel.	Bahan perpustakaan dapat diakses oleh siapapun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh perpustakaan.
6.	Apakah perpustakaan melindungi hak privasi (sesuai dengan kebutuhannya) pengguna dalam mengakses informasi di perpustakaan?	Tidak ada pembatasan akses informasi di perpustakaan dan tidak memandang dari aspek latar belakang sosial pemustaka. semua lapisan masyarakat dapat dan berhak mengakses segala informasi yang ada di perpustakaan. Kami memberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mendiskriminasikan salah satu golongan masyarakat. Pembatasan hanya pada tata letak ruangan. Ruangan khusus anak-anak terletak paling bawah, agar tercipta situasi yang kondusif. Untuk ruangan dewasa atau koleksi umum dan ruangan bagi peneliti terletak paling atas, agar tercipta kenyamanan dan kondusif.	Perpustakaan tidak membatasi akses ke suatu koleksi tertentu. Semua informasi perpustakaan dapat diakses oleh siapa saja.

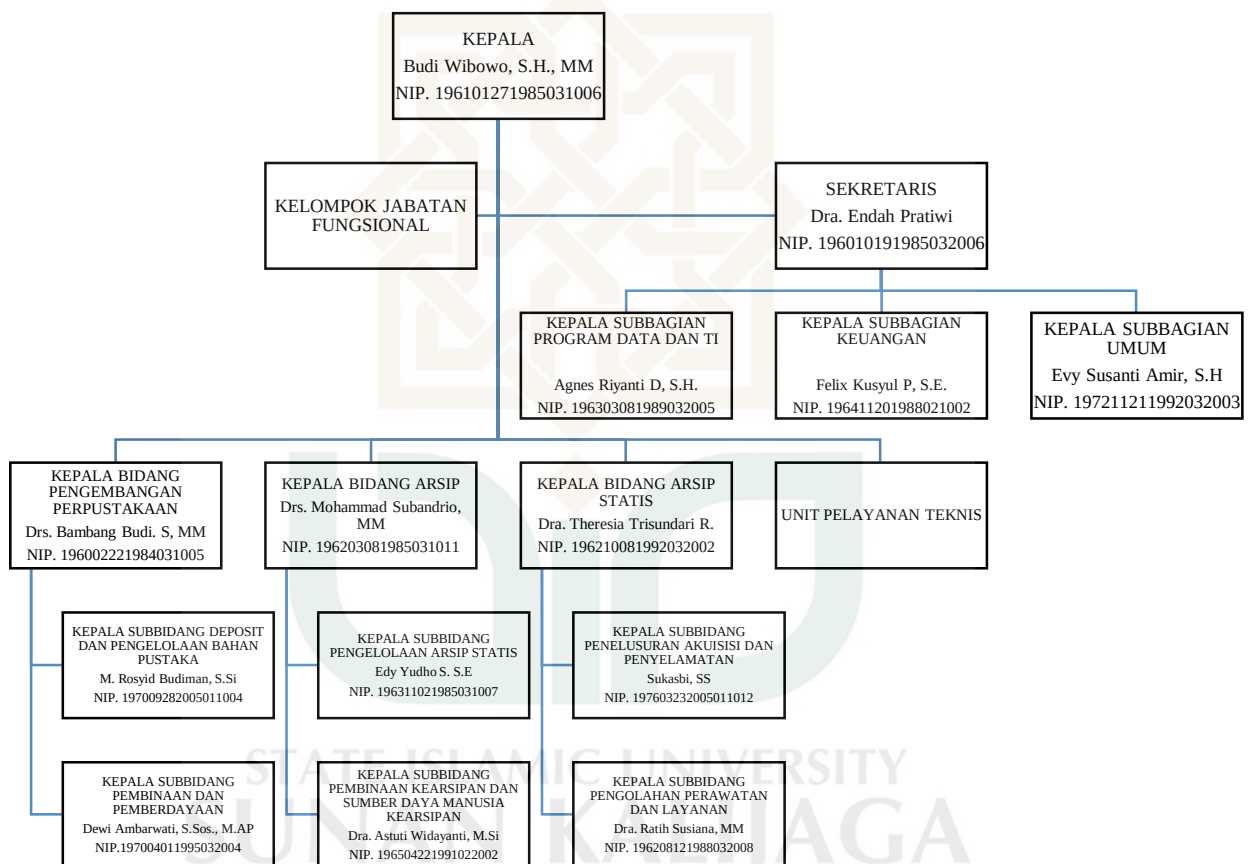
7.	Sebagai penyedia informasi, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah bebas dalam diseminasi(penyebaran) informasi?	Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan tersebut dengan memberikan layanan perpustakaan keliling ke daerah-daerah. Selain itu, perpustakaan mengembangkan system katalog online untuk membantu mencari dan menelusuri buku yang akan dicari tanpa datang ke perpustakaan. Perpustakaan juga mengembangkan perpustakaan elektronik yaitu <i>ijogja</i> .	Perpustakaan bebas dalam menyebarkan informasi ke pemustaka.
8.	Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyebaran informasi?	Tantangan yang dihadapi Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka yang pertama adalah faktor anggaran, kedua karena sedikitnya penerbitan yang ada sehingga perpustakaan harus membeli ke luar daerah untuk memenuhi target penyerapan anggaran.	Tantangan dalam penyebaran informasi adalah permasalahan anggaran atau keuangan.
9.	Sebagai ruang publik yang dapat diakses semua golongan masyarakat, apakah perpustakaan Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY sudah memberikan ruang atau fasilitas bagi seluruh golongan masyarakat? Misalnya seperti ruang akses khusus anak-anak atau ruang khusus bagi kaum difabel?	Kami sudah menyediakan ruang dan fasilitas publik untuk dapat diakses, salah satunya dengan ruang seminar untuk bedah buku atau ruang pertemuan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Selain masyarakat umum, kami juga menyediakan akses jalan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel dengan desai gedung yang mendukung seperti adanya <i>lift</i> bagi masyarakat difabel yang akan memanfaatkan layanan yang ada. Namun seharusnya ada komputer khusus difabel yang mendukung dalam mengakses informasi digital.	Seluruh fasilitas perpustakaan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dari segala lapisan.
10.	Apakah perpustakaan menentang sensor baik itu berasal dari pemerintah daerah/pusat?	Perpustakaan tidak melakukan sensor terhadap salah satu bahan perpustakaan dalam proses seleksi koleksi. Karena perpustakaan memiliki wewenang untuk menyimpan segala bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kecuali ada perintah khusus dari pihak berwenang untuk tidak diedarkan saja namun belum pernah ada kejadian larangan untuk tidak boleh menyimpan bahan perpustakaan.	Perpustakaan menentang sensor dengan tetap menyimpan bahan perpustakaan sebagai fungsi pelestarian.

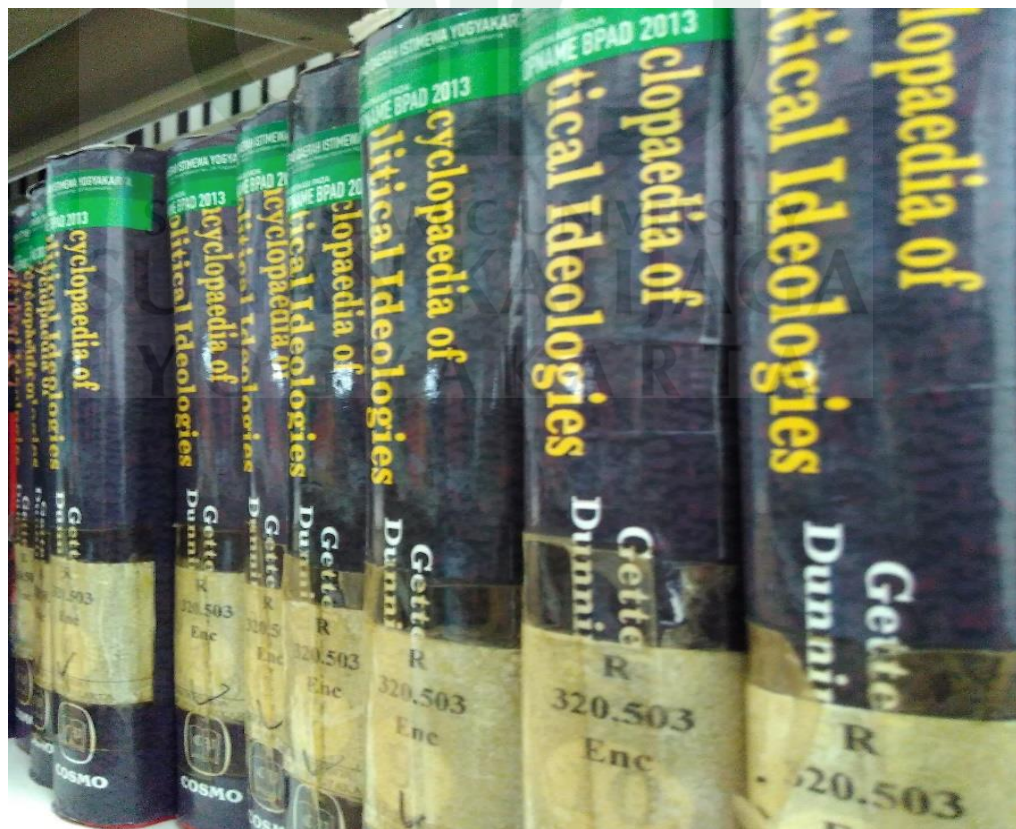
11.	Bagaimana sikap perpustakaan terhadap sensor (tindakan pelarangan dari lembaga atau kelompok tertentu atas koleksi perpustakaan)?	Semua informasi yang ada di perpustakaan tetap kami sampaikan akses. kepada pemustaka. Selama ini belum pernah ada protes terhadap koleksi perpustakaan. Jika terdapat keluhan/protes, kita ajak diskusi terlebih dahulu dan mencari permasalahan serta pemecahan masalah atas permasalahan protes atau keluhan. Belum ada protes dari pihak manapun atas koleksi perpustakaan dan kami berhati-hati dengan buku-buku kontroversi. Jika terdapat pelarangan buku dari lembaga Negara seperti Kejaksaan Agung untuk tidak boleh beredar, hal itu bukan suatu batasan, namun aturan dari pusat jika terdapat pelarangan buku, maka kami tidak bisa mengadakan buku tersebut. Jika buku kontroversial tersebut pada masanya dilarang, namun dengan perkembangan zaman dan situasi kondusif dalam masyarakat, perpustakaan akan mempertimbangkan buku kontroversial tersebut untuk diadakan. Sebenarnya, perpustakaan lebih memprioritaskan buku-buku lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Perpustakaan tetap mengadakan dan menyeleksi bahan perpustakaan yang dianggap terlarang namun dengan batasan untuk kegiatan penelitian.
12.	Adalah usaha-usaha perpustakaan dalam mendukung kebebasan intelektual?	Kita harus menunjung nilai netralitas terhadap SARA, politik, ideologi dalam proses seleksi koleksi. Kami melakukan kegiatan seleksi dengan baik tidak ada tendesi pada latar belakang dari informasi atau buku tertentu. Dan memberikan dan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum.	Perpustakaan melakukan seleksi bahan perpustakaan dengan baik dan profesional dan menghindari bias pribadi.
13.	Apakah perpustakaan pernah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap kebebasan berekspresi seperti dengan lembaga swadaya masyarakat tertentu?	Perpustakaan selama ini koordinasi dengan organisasi perpustakaan di antaranya seperti: Ikatan Pustakawan Indonesia dan Dewan Perpustakaan Indonesia dalam menjalankan kepastakawannya.	Perpustakaan bekerjasama dengan organisasi atau lembaga yang fokus dalam pengembangan perpustakaan.
14.	Walaupun dalam aktivitasnya dibiayai oleh masyarakat, bagaimana sikap	Perpustakaan menjunjung netralitas dalam pengembangan koleksi dan dengan pertimbangan profesional berdasarkan kebutuhan masyarakat.	Perpustakaan bersikap netral dalam pengadaan dan seleksi koleksi sesuai

	perpustakaan jika ada individu atau lembaga yang mengintervensi dalam kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan? Misalnya melarang atau tidak merekomendasikan sebuah buku ?	Tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam proses pengembangan koleksi, sepenuhnya dilakukan oleh pihak selektor dan pustakawan dalam seluruh aktivitas pengadaan dan seleksi koleksi. Pemustaka boleh memberikan masukan dengan saran buku yang akan dibeli oleh perpustakaan. Kami berusaha menciptakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara adil dan beragam sesuai dengan masyarakat yang plural. Dalam pengadaan buku, kami mengutamakan subyek yang sedang populer atau diminati oleh pemustaka. Misalkan sedang ada gejolak politik maka perpustakaan akan mengutamakan bahan perpustakaan yang bemuatan politik. Namun jika situasi masyarakat kondusif, maka perpustakaan menyediakan bahan perpustakaan tentang kewirausahaan. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan tersebut dengan memberikan layanan perpustakaan keliling ke daerah-daerah. Selain itu, perpustakaan mengembangkan system katalog online untuk membantu mencari dan menelusuri buku yang akan dicari tanpa datang ke perpustakaan. Perpustakaan juga mengembangkan perpustakaan elektronik yaitu <i>ijogja</i>.	dengan tujuan dan kebutuhan pemustaka.
--	---	--	---

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY



LAMPIRAN**DOKUMENTASI FOTO KOLEKSI BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN
GRHATAMA PUSTAKA BPAD DIY**





PEDOMAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH



Perpusda Unit Badran JI. TR Mataram 4 Yogyakarta

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

2009

Rumusan Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Visi dan misi

Visi:

Terwujudnya perpustakaan dan arsip sebagai sumber referensi dan informasi menuju masyarakat pembelajar (*learning society*) di DIY pada tahun 2025.

Misi Antara:

Terwujudnya system informasi terpadu perpustakaan dan arsip menuju masyarakat pembelajar (*learning society*).

Misi:

- a. Mewujudkan efektifitas pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi
- b. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan dan arsip secara optimal
- c. Mewujudkan perpustakaan dan arsip sebagai khasanah budaya daerah
- d. Meningkatkan peran perpustakaan menjadi rumah belajar bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing
- e. Mengembangkan jaringan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi
- f. Menjadi motivator dan fasilitator pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan masyarakat serta pemantapan kerja sama dengan lembaga masyarakat.

2. Tujuan

Kebijakan pengembangan koleksi berfungsi sebagai pedoman, sarana komunikasi, dan perencanaan. Kebijakan pengembangan koleksi dibuat oleh perpustakaan untuk:

- a. Menjelaskan cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan selanjutnya, agar diketahui oleh staf perpustakaan, pemakai, administrator, dan dewan Pembina perpustakaan.
- b. Memberi deskripsi yang sistematis tentang strategi pengelolaan dan pengembangan koleksi yang diterapkan di perpustakaan.
- c. Menjadi pedoman bagi para pustakawan sehingga ketaatan dalam proses seleksi dan deseleksi terjamin, koleksi yang responsif dan seimbang terbentuk, dan dana dimanfaatkan dengan sebijaksana mungkin.
- d. Menjadi standar atau tolak ukur untuk menilai sejauh mana sasaran pengembangan koleksi telah tercapai.
- e. Sebagai sumber informasi dan panduan bagi staf yang baru mulai berpartisipasi dalam pengembangan koleksi.
- f. Memperlancar koordinasi antar anggota staf pengembangan koleksi.
- g. Memperlancar kerja sama antar perpustakaan dalam pengembangan koleksi.
- h. Membantu menjaga kontinuitas, serta menjadi kerja yang memperlancar transisi dari pustakawan lama ke penggantinya.
- i. Membantu para pustakawan menghadapi pengaduan berkenaan dengan bahan yang telah diseleksi atau ditolak.
- j. Mengurangi pengaruh selector tertentu dan bias atau selera pribadi.
- k. Membantu mempertanggungjawabkan anggaran.

1. Menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat yang harus dilayani maupun pihak luar lain yang memerlukan informasi mengenai tujuan dan rencana pengembangan koleksi.

3. Pedoman umum pemilihan bahan perpustakaan

- a. Rencana operasional pengembangan koleksi

Rencana operasional ini berisi langkah-langkah atau prosedur kerja tahap demi tahap

- b. Alat seleksi

1. Alat bantu seleksi buku

- a. Katalog penerbit dari berbagai penerbit baik dalam negeri maupun luar negeri
 - b. Tinjauan buku, yang dimuat dalam majalah ilmiah
 - c. Timbangan / resensi buku yang dimuat di media massa
 - d. Daftar buku IKAPI
 - e. Bibliografi nasional
 - f. Daftar usulan buku baru
 - g. Daftar tambahan buku baru/asosiasi list dari perpustakaan lain

2. Alat bantu seleksi bahan rujukan

Alat bantu seleksi untuk buku-buku referensi terbitan Indonesia sementara ini masih menjadi satu/sama dengan alat bantu seleksi buku. Akan tetapi untuk buku-buku referensi

terbitan penerbit luar negeri sudah tersedia alat bantu seleksinya yaitu *Guide to Reference Books*

3. Alat bantu seleksi terbitan berkala

Alat bantu seleksi terbitan berkala secara internasional menggunakan *Ulrich's International Periodical Directory* terbitan Amerika.

4. Survey Minat Pemakai

Secara ideal survey ini dilakukan setiap tahun sesuai dengan periode pengadaan bahan pustaka dan tahun anggaran yang sudah ada. Survey dilakukan dengan penyebaran angket kepada para pengguna perpustakaan (khususnya yang sudah menjadi anggota perpustakaan) menetap maupun perpustakaan keliling.

5. Survey Bahan Pustaka

Pada langkah selanjutnya melakukan survey bahan pustaka yang ada dipasaran / penerbit/ took buku, kemudian menulis hasil survey ke dalam format khusus yang disediakan, kemudian difile secara otomatis

6. Seleksi Bahan Pustaka

a. Tim Seleksi

tim seleksi terdiri dari unsur pustakawan senior, pejabat structural terkait, pengguna potensial dan unsur lain yang peduli terhadap perpustakaan yang memiliki kompetensi memadai untuk seleksi. Tim seleksi dibentuk oleh pejabat tertinggi atau berwenang di perpustakaan atau

menurut ketentuan lembaga induk. Disamping ketentuan di atas secara rinci Tim seleksi harus memiliki kompetensi:

- 1) Menguasai bidang subyek dari bahan pustaka yang akan diseleksi
- 2) Menguasai sarana bibliografi yang tersedia, paham akan dunia penerbitan khususnya mengenai penerbit, spesialisasi para penerbit, hasil terbitan yang selama ini dan sebagainya
- 3) Mengetahui latar belakang pemakai perpustakaan, misalnya siapa saja yang menjadi anggota dan sebagainya
- 4) Memahami kebutuhan pemakai
- 5) Menguasai informasi dan memiliki akal sehat dalam pemilihan buku
- 6) Mengetahui beberapa jenis bahan pustaka yang berada di pasaran
- 7) Memahami tujuan dan fungsi perpustakaan tempat ia bekerja
- 8) Mengenal kebutuhan masyarakat yang dilayani
- 9) Mengenal dan mampu menggunakan alat-alat seleksi
- 10) Memahami kendala yang ada

b. Profil Selektor Ideal

1. Selektor harus memiliki informasi yang mendalam dan detail mengenai semua judul yang diterbitkan terakhir

a. Selektor harus membaca buku-buku terakhir setiap bidang subyek supaya mereka bisa memilih judul-judul yang bagus dari sejumlah buku, selektor harus mengetahui seluruh buku yang ada

b. Selektor harus mengembangkan sejumlah sistem untuk mengkaver bidang-bidang yang diterbitkan terakhir

c. Selektor harus memiliki pengetahuan yang cukup matang tentang karya-karya terdahulu yang dihasilkan oleh pengarang, mengetahui pengarang untuk subyek

2. Pengetahuan selector tentang subyek harus luas dan terus meningkat secara konstan

3. Selektor harus terbiasa dengan masyarakat yang dilayani, mengetahui tingkat pendidikan mereka

4. Selektor harus dapat memperkirakan antara tingkat kesulitan buku dengan kemampuan pemakai

5. Selektor harus menghindari bias dalam menyeleksi bahan pustaka

6. Selektor harus mengetahui koleksi setiap subyek yang ada di perpustakaan

7. Selektor harus mampu menghindari terjadinya duplikasi koleksi dari berdasarkan data koleksi yang sudah ada

c. Kriteria Koleksi

kriteria ini dibuat untuk membantu pustakawan dan pengambil kebijakan dalam pemilihan bahan yang berkualitas untuk pengembangan koleksi perpustakaan

1. Bahan tercetak

a. Kualitas isi

1) Karya fiksi

- a) Merupakan karya yang telah mendapat review yang positif dari kritikus yang bereputasi baik atau orang ahli di bidangnya
- b) Harus disajikan dalam bahasa yang memungkinkan pembaca mengikuti dan memahami gagasan penulis

2) Karya *non-fiksi*

- a) Bahan pustaka yang dibeli harus menyajikan data dengan akurat dan prioritas diberikan pada judul-judul hasil para ahli yang merupakan otoritas di bidang mereka atau yang mewakili konsensus pendapat para pakar
- b) Harus mempunyai acuan bibliografi dan indeks yang lengkap dan akurat

b. Fiksi

- 1) Bahan yang dipilih harus tercetak dalam huruf yang berspasi rata dan dalam tipe huruf yang cukup besar dibaca dengan mudah
- 2) Penjilidan harus kuat, menarik dan buku harus mudah dibaca
- 3) Kertas berkualitas baik
- 4) Margin halaman harus cukup lebar untuk memungkinkan penjilidan ulang dan pembacaan dan pembuatan fotokopy tanpa merusak penjilidan
- 5) Ilustrasi harus serasi dengan isi buku dan ditempatkan pada tempat yang sesuai dalam teks tercetak
- 6) Reproduksi karya seni, peta dan foto yang dilengkapi teks harus terfokus (tidak boleh kabur) dan warna harus jernih dan akurat
- 7) Harga terjangkau/ sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran

c. Penerbit

Karya cetak yang dipilih harus merupakan produk penerbit dengan standar kualitas yang tinggi dan reputasi baik, khususnya dalam penyajian materi

Di samping kriteria secara khusus tersebut di atas secara umum perlu dipertimbangkan hal-hal seperti berikut:

- 1) Koleksi mengenai sejarah local diperkuat
- 2) Koleksi mengenai buku-buku perpustakaan diutamakan
- 3) Hindari pengaruh dan tekanan dalam seleksi, adakan seluruh materi secara fair.
Judul-judul yang bersifat propaganda dapat ditambahkan sejauh dibutuhkan
- 4) Seleksi fiksi-fiksi yang bersifat edukatif
- 5) Kenali penerbit, harga dan nilai
- 6) Kenali pengarang dan karya-karya mereka jika mungkin kembangkan sistem peringkat
- 7) Memperbanyak judul lebih baik daripada memperbanyak eksemplar atau sebaliknya atau dengan pertimbangan yang sesuai
- 8) Pilih pemakaian yang positif, jangan hanya memilih buku-buku yang bagus tetapi sedikit digunakan
- 9) Kemutahiran isinya sebagai factor penentu
- 10) Judul yang merefeksikan masyarakat asal harus didahulukan bila ada subyek yang sama yang membahas tentang masyarakat lain.

7. Desiderata

Seleksi bahan pustaka dibuat dalam bentuk file, satu judul satu file. Judul-judul bahan pustaka yang sudah dibuat dalam bentuk file ini selanjutnya diseleksi ulang, dan hasil dari kegiatan ini dibuat dalam bentuk daftar pesanan buku. Judul-judul bahan pustaka dalam file yang tidak dicalonkan untuk dipesan selanjutnya di file pada tempat tersendiri yang dinamakan desiderata. Jajaran file/desiderata ini dijadikan bahan pertimbangan untuk diadakan / tidak diadakan pada pengadaan berikutnya.

8. Pengadaan Bahan Pustaka

Beberapa pertimbangan di dalam pengadaan bahan pustaka:

- a. Komposisi masyarakat yang dilayani (kelompok, usia, etnik, bahasa, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama dll)
- b. Kebutuhan khusus berkaitan dengan perubahan dalam keadaan ekonomi, social, politik dalam lingkungan para pemakai
- c. Jumlah copy perjudul untuk buku yang sedang populer (*best seller*)
- d. Permintaan akan bahan dalam bidang-bidang yang sangat diminati masyarakat
- e. Jumlah dan jenis bahan yang diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan informasi
- f. Jumlah dan permintaan yang hanya dapat dilayani lewat jasa pinjam antar perpustakaan
- g. Perbandingan antara bahan tercetak dan bahan audio-video
- h. Pergantian bahan yang rusak atau hilang

Koleksi perpustakaan yang dimiliki untuk karya cetak atau karya grafis seperti buku, majalah, surat kabar, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan sebagainya.

9. Penyiangan Bahan Perpustakaan

a. Kriteria Penyiangan

1) Kondisi Fisik bahan

Bahan perpustakaan yang sudah kotor sekali, robek, tidak lengkap, huruf terlalu kecil.

2) Isi

Sudah ketinggalan jaman, data tidak akurat lagi, tidak bermanfaat karena perubahan dalam kurikulum, atau program prodi, sudah ada edisi lebih baru, tidak sesuai / relevan lagi dilihat dari segi minat pemakai, nilai intrinsik tidak ada, dsb

3) Penggunaan

Bahan yang tidak pernah dipakai atau kurang dipakai atau sudah lama tidak dipakai dikeluarkan.

4) Duplikasi

Jika dari satu judul ada beberapa eksemplar, penyiangan dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebijakan saat itu, misalnya akan dipertahankan di koleksi sejumlah 5 eksemplar, selebihnya akan dikelola secara khusus sesuai peruntukan.

b. Kriteria bahan yang harus dikeluarkan dari koleksi :

1) Koleksi Umum (*General Collection*)

Semua judul koleksi umum yang rusak, hilang dan sudah sangat lama dipinjam atau tidak dikembalikan menjadi calon untuk ditarik/dihapus dari koleksi.

2) Bahan Rujukan

Bahan rujukan yang secara periodic menjadi kadaluarsa karena telah ada revisi atau edisi baru sebagai penggantinya menjadi calon untuk ditarik dari koleksi.

3) Terbitan Pemerintah

Terbitan pemerintah yang ada dalam koleksi, yang menjadi kadaluarsa karena telah ada edisi baru menjadi calon untuk ditarik.

4) Terbitan Berseri

Setiap tahun pustakawan dan staf layanan meninjau kembali koleksi terbitan berseri dan menilai judul-judul yang hanya sekali dipakai.

c. Bahan-bahan lain

- 1) Bahan pustaka lebih dari lima eksemplar tiap judulnya.
- 2) Bahan pustaka yang tidak diminati dalam lima tahun terakhir atau lebih.
- 3) Bahan pustaka yang rusak.
- 4) Bahan pustaka yang sudah dikategorikan lama.

d. Pelaksanaan Penyiangan:

Demi efektivitas dan efisiensi, penyiangan dilakukan oleh petugas layanan khususnya petugas yang mengelola rak koleksi. Ketentuan-ketentuan mengenai kriteria penyiangan dibuat oleh tim Pengembangan Koleksi.

e. Frekuensi Penyiangan:

Secara resmi pelaksanaan penyiangan dilakukan satu tahun sekali. Namun pada praktek pelaksanaannya demi pertimbangan tenaga, waktu, dan anggaran dapat dilakukan setiap saat apabila suatu koleksi perlu dikeluarkan dari koleksi.

f. Tindakan yang dilakukan terhadap hasil penyiangan:

- 1) Bahan pustaka lebih dari lima eksemplar tiap judulnya, kelebihan ini selanjutnya dikelola untuk dipinjamkan ke perpustakaan lain dalam bentuk paket buku atau *bulk loan* dalam konteks *interlibrary loan* atau dihibahkan.
- 2) Bahan pustaka yang tidak diminati dalam lima tahun terakhir atau lebih selanjutnya dikelola secara khusus.
- 3) Bahan pustaka yang rusak, selanjutnya diambil tindakan untuk perbaikan bila masih layak untuk dilayankan atau dihapus dari koleksi apabila tindakan perbaikan tidak mungkin dilakukan.
- 4) Bahan pustaka yang sudah dikategorikan lama dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu langka dan lama.
 - a) Untuk kategori langka dengan kriteria:
 - Mempunyai nilai historis / tetap
 - Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun

- Tidak diterbitkan lagi
 - Tidak beredar lagi di pasaran
 - Sulit ditemukan di masyarakat
- b) Untuk kategori lama dengan kriteria :
- Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun
 - Tidak dipinjam lagi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
 - Secara fisik tidak layak untuk dilayani

10. Kebijakan Umum

a. Bahan Perpustakaan yang diadakan

Bahan pustaka yang perlu diadakan oleh perpustakaan terdiri dari:

- 1) Karya cetak atau karya grafis seperti buku, majalah, surat kabar, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan sebagainya.
- 2) Bahan kartografi seperti; peta, global.
- 3) Hasil-hasil seminar . proseding, penelitian.
- 4) Skripsi, khususnya bidang perpustakaan.

b. Jumlah Bahan Pustaka yang diadakan

- 1) Untuk koleksi perpustakaan menetap satu judul diadakan sejumlah tiga eksemplar.
- 2) Untuk koleksi perpustakaan keliling mobil satu judul sejumlah 10 eksemplar.
- 3) Untuk koleksi perpustakaan keliling roda dua satu judul sejumlah dua eksemplar.
- 4) Untuk koleksi surat kabar :
 - a. Surat kabar minimal 2 terbitan.

- b. Surat kabar nasional minimal 2 terbitan.
- c. Surat kabar berbahasa asing minimal 1 terbitan.

5) Untuk koleksi majalah :

- a. Majalah anak minimal 2 terbitan.
- b. Majalah remaja minimal 2 terbitan.
- c. Majalah umum minimal 5 terbitan.
- d. Jurnal dalam berbagai terbitan.

6) Untuk koleksi manuskrip minimal 1 judul

c. Komposisi Koleksi:

a. Komposisi koleksi yang sudah ada saat ini

1) Umum	: 10.818 jdl	22.609 eks	=
8,41%			
2) Filsafat	: 5.824 jdl	11.508 eks	=
4,54%			
3) Agama	: 8.724 jdl	20.663 eks	=
6,78 %			

4) Ilmu sosial	: 45.237 jdl	102.448 eks	=
35,17 %			
5) Bahasa	: 6.053 jdl	12.074 eks	=
4,70 %			
6) Ilmu murni	: 6.820 jdl	13.182 eks	=
5,30%			
7) Ilmu terapan	: 23.238 jdl	47.947 eks	=
18,07%			
8) Seni/rekreasi/olahraga	: 6.112 jdl	12.925 eks	=
4,75%			
9) Sastra	: 8.087 jdl	17.372 eks	=
6,27 %			
10) Geografi, sejarah, biografi	: 7.695 jdl	14.108 eks	=
5,98%			
11) Fiksi	: 6.087 jdl	12.108 eks	=
4,51%			

134.678 jdl 286.972 eks

b. Komposisi koleksi yang akan dikembangkan

1) Umum	: 209 jdl	613 eks	=
7,95 %			

2) Filsafat	: 225 jdl	533 eks	
= 8,56 %			
3) Agama	: 360 jdl	922 eks	
= 13,69 %			
4) Ilmu sosial	: 441 jdl	1.239 eks	
= 16,78 %			
5) Bahasa	: 58 jdl	169 eks	
= 2,20 %			
6) Ilmu murni	: 63 jdl	198 eks	
= 2,39 %			
7) Ilmu terapan	: 691 jdl	1.728 eks	
= 26,29 %			
8) Seni/rekreasi/olahraga	: 195jdl	504 eks	
= 7,42 %			
9) Sastra	: 66 jdl	182 eks	
= 2,51 %			
10) Geografi, sejarah, biografi	: 159 jdl	367 eks	
= 6,05 %			
11) Fiksi	: 161jdl	437 eks	=
6,12 %			
	2.628 jdl	6.893 eks	

d. Hadiah

Hadiah atau sumbangan berupa bahan perpustakaan diterima setelah dipertimbangkan oleh pustakawan, dan hadiah tersebut tidak boleh disertai dengan berbagai macam syarat. Perpustakaan harus mendapat kebebasan dalam menentukan apa yang akan dilakukan dengan bahan tersebut setelah menjadi milik perpustakaan.

Hanya bahan yang dalam kondisi fisik baik dan yang sesuai dengan tujuan pengembangan koleksi, pedoman, dan kebijakan perpustakaan akan dimasukkan dalam koleksi perpustakaan. Semua bahan lain yang tidak dapat dimanfaatkan akan dihibahkan ke perpustakaan lain yang membutuhkan, atau dimusnahkan.

Perpustakaan harus memberi surat tanda terima/ terima kasih kepada pemberi hadiah/sumbangan, semua biaya yang timbul akibat terkirimnya bahan untuk dihadiahkan ke Badan Perpustakaan menjadi beban pengeluaran pemberi hadiah/sumbangan.

Sumbangan berupa uang untuk membeli bahan perpustakaan diterima apabila mendapat persetujuan pimpinan perpustakaan dan melalui mekanisme yang berlaku. Untuk karya cetak dan karya rekam sebagai pelaksanaan UU wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam diatur di Sub.Bagian Deposit.

1. Pinjam antar perpustakaan

Koleksi yang digunakan untuk dipinjamkan ke pihak lain (pinjam antar perpustakaan) adalah koleksi yang sudah ada di perpustakaan dan tidak diadakan secara khusus, kecuali ada ketentuan lain.

2. Hibah

Koleksi yang dihibahkan kepada pihak lain adalah koleksi yang jumlah eksemplarnya berlebih di perpustakaan dan sudah melalui mekanisme yang berlaku.

3. Sensor

Berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sensor buku, perpustakaan akan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

: Dra. Kristiana Swasti

Penulis Naskah

- : 1. Dra. Ratih Susiana
2. Drs. Budiyo, SIP
3. Rini Handayani, SE, M.Si
4. Biyanto, S.IP
5. Dra. Sri Ambarwati
6. Dewi Ambarwati, S.Sos

Pembahas

: Lasa HS

Editor

: 1. Drs. R. Heru Purwanto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Budiyono, SIP
Jabatan : Pustakawan Madya

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Rasyid Maruf**, Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "**Kebebasan Intelektual di Perpustakaan Umum (Studi Kasus di Balai Layanan Perpustakaan BPAD DIY)**". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 11 Juli 2017.

Informan


Budiyono

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ROSYID BUDIMAN, S.Si
Jabatan : Subbidang Depart dan Pengelolaan
Bahan Perpustakaan BRAD IISY

Menyatakan bersedia untuk menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Rasyid Maruf**, Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "**Kebebasan Intelektual di Perpustakaan Umum (Studi Kasus di Perpustakaan Grhatama Pustaka)**". Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Yogyakarta, 10 MARET 2017

Informan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

JALAN TENTARA RAKYAT MATARAM NO. 29

TELP. 513969, (Fax) 563367

YOGYAKARTA 5523

Website : <http://bpadjogja.info> e-mail : bpad-diy@yahoo.com

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Nomor : 070/1104

Lamp. : -

H a l : Ijin Penelitian

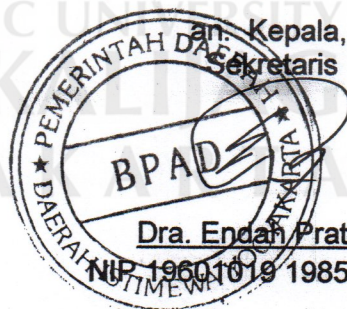
Kepada
Yth. Muhammad Rasyid Maruf
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Menanggapi Surat Keterangan/Ijin Penelitian/Riset Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY nomor : 074/1462/Kesbangpol /2017 tanggal, 13 Februari 2016 perihal : Ijin Penelitian/riset dengan ini disampaikan bahwa instansi kami dapat membantu mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM (Studi kasus di Perpustakaan Ghatama Pustaka BPAD DIY) :

Nama : Muhammad Rasyid Maruf
NIM : 11140050

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dra. Endah Pratiwi

NIP. 19601019 198503 2 006

Tembusan : 1. Kepala Balai Layanan Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Alamat: Jl. Marsda Adi Sucipto Telp./Fak. (0274)513949
<http://adab.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-525/Un.2/DA.1 / TU.00.02/08 /2016

25 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Penetapan Pembimbing

Kepada Yth. :

M. Solihin Arianto, S.Ag., SS., M.LIS.

Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan oleh Saudara :

Nama : Muhammad Rasyid Ma'ruf

NIM : 11140050

Semester : XI

Judul Skripsi :

KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM
(STUDI KASUS DI BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan menetapkan Saudara menjadi Pembimbing untuk penulisan skripsi yang dimaksud. Apabila Saudara berkeberatan, harap memberitahukan kepada jurusan dalam waktu 3 hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian agar menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan,
Kaprodi Ilmu Perpustakaan

Djazim Rohmadi

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (*arsip*)
2. Pembimbing Skripsi;
3. Penasehat Akademik;
4. Mahasiswa ybs.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fak. (0274)513949
<http://adab.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

10 Februari 2017

Nomor : B- 228/Un.02/DA.1/TU.00.02/02/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:
Yth, GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KESBANGPOL DIY
Jl. Jend. Sudirman No.05
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rasyid Ma'ruf
NIM : 11140050

akan melakukan penelitian di Perpustakaan Grhatama Pustaka DIY dalam rangka
Penulisan Skripsi dengan Judul :

KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM
(Studi Kasus di Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY)

di bawah Bimbingan : M. Solihin Arianto, S.Ag., SS., M.LIS.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat
memberikan izin kepada mahasiswa tersebut dalam rangka melakukan penelitian.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Maharsi

Tembusan :
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya;



Yogyakarta, 13 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1462/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-228/Un.02/DA.1/TU.00.02/02/2017
Tanggal : 10 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"KEBEBASAN INTELEKTUAL DI PERPUSTAKAAN UMUM (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN GRHATAMA PUSTAKA BPAD DIY)"** kepada :

Nama : MUHAMMAD RASYID MARUF
Nim : 11140050
No. HP/Identitas : 085729475679 / 3404011205920007
Prodi/Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Fakultas : Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY
Waktu Penelitian : 13 Februari 2017 s.d. 13 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

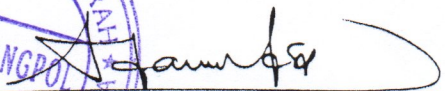
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY


AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

DAFTAR HARGA, ISBN TAHUN TERBIT & STOCK BUKU UII PRESS
PER: DESEMBER 2016

NO	JUDUL BUKU	PENGARANG	KOTA TERBIT	PENERBIT	CET.	THN.	ISBN	JUMLAH HALAMAN	UKURAN
	Cetakan Tahun 2016								
1	Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi	Mahmudi	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-979-333-98-4	xii + 354	19 x 24,5 cm, HVS 70
2	Hukum dan Hubungan Internasional	Prof. Jawahir Tonthowi	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-979-3333-61-8	xx + 404	16 x 24 cm, HVS 70
3	Hukum Pidana Korupsi	Mahrus Ali	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-979-3333-99-1	xiv + 310	16 x 23 cm, HVS 70
4	Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga	Dr. I. Ketut Sudira, SH., M.	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-602-6215-06-2	x + 158	16 x 23 cm, HVS 70
5	Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia	Dr. H. M. Rum Nessa, SH.,	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-979-3333-92-2	xvi + 322	16 x 23 cm, HVS 70
6	Mengungkap Stagnasi Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia	Dr. H. M. Sutowo, SH., MH	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-979-3333-93-9	xxvi + 346	16 x 23 cm, HVS 70
7	Pendidikan Karakter Menjadikan Manusia Berkeadilan	Prof. Dr. Jassin H. Tuloli dkk	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-602-6215-05-5	xxxiv + 162	16 x 23 cm, HVS 70
8	Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan Teori dan Praktek	Fauzan, M.Ed	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-602-6215-08-6	xii + 170	16 x 23 cm, HVS 70
9	Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah	Prof. Dr. Muhammad,	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-602-6215-00-0	xxiv + 232	15 x 21 cm, HVS 70
10	Kepemimpinan Islam	H. Aunurrahim Faqih & IIP	Yogyakarta	UII Press	IV	2016	979-8413-71-7	viii + 76	14 x 21 cm, HVS 70
11	Pemikiran & Peradaban Islam	DPPAI UII	Yogyakarta	UII Press	V	2016	979-8413-11-3	x + 136	14,5 x 21 cm, HVS 70
12	Lembaga Kenotariatan Indonesia	Prof. Dr. H. Abdul Ghoftur A	Yogyakarta	UII Press	IV	2016	978-602-6215-16-1	viii + 270	16 x 23 cm, HVS 70
13	Pancasila Dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap	Prof. Jawahir Tonthowi	Yogyakarta	UII Press	I	2016	978-602-6215-15-4	xxii + 118	16 x 23 cm, HVS 70
	Panduan Menuju Pusa Paripurna	Muhammad, Mag-	Yogyakarta	UII Press	I	2016	979-3333-93-6	xx + 70	14,5 x 21 cm, HVS 70
	Ma Dan Nalar Sekuler Dalam Islam	Robert Audi/Amir Mu-	Yakarta	UII Press	I	2016	979-8413-78-8	xx + 100	17,5 x 23 cm, HVS 70
	Islam CU TH 2014	DPPAI UII	Yogyakarta	UII Press	V	2014	979-8413-09-1	xii + 160	14,5 x 20,7 cm, HVS 70
4	Akuntabilitas Putusan Akbar Tanjung Oleh I/A	Dr. SF. Marbun	Yogyakarta	UII Press	I	2004	979-3333-28-2	xii ÷ 612	16 x 23 cm, HVS 70
5	Akuntansi Sektor Publik cetakan 1	Mahmudi	Yogyakarta	UII Press	I	2011	978-979-3333-38-0		19 x 24,5 cm, HVS 70
7	Al Quran dan Tatsirnya Lengkap 1 Set 11 Jilid/HC	Prof. Zaini Dahlan & Tim	Yogyakarta	UII Press	I	2007	979-3333-74-2	1 set + 11 jilid	16 x 23 cm, HVS 70
8	Anatomi Hukum Pidana Khusus	Hariman Satria SH, MH	Yogyakarta	UII Press	I	2014	978-979-3333-68-7	xii + 160	16 x 23 cm, HVS 70
9	Antologi Pendidikan dan Dakwah	H. Kamrani Busyeiri	Yogyakarta	UII Press	I	2003	979-3333-09-X	xii + 232	15 x 21 cm, HVS 70
10	Asas-Asas Hukum Muamalat	KH. Ahmad Azhar Basir, M	Yogyakarta	UII Press	II	2004	979-8413-45-8	x + 134	11,5 x 18 cm, HVS 70
11	Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada	Dr. H. Abd. Halim Talil, M.A	Yogyakarta	UII Press	I	2014	978-979-3333-67-0	xii + 222	15,5 x 21,5 cm, HVS 70
12	Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Bank Syari	Bagya Agung Prabawa	Yogyakarta	UII Press	I	2012	978-979-3333-47-2	xii + 252	16 x 23 cm, HVS 70
13	Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah	Muhamad	Yogyakarta	UII Press	I	2011	979-3333-89-8	x + 158	14,5 x 21 cm, HVS 70
14	Beragama secara Dewasa	KH. Ahmad Azhar Basir,	Yogyakarta	UII Press	II	2013	979-8413-88-1	xii + 160	11,5 x 18 cm, HVS 70
15	Berantas Narkoba Tidak Cukup Hanya Berbicara	Hey Willady	Yogyakarta	UII Press	I	2005	979-3333-73-5	xx + 266	15 x 21 cm, HVS 70
16	Bimbingan Sholat lengkap	-	Yogyakarta	UII Press	I	2014	978-979-3333-79-3	x + 106	15 x 21 cm, HVS 70
17	Citra Manusia Dan Masyarakat Muslim	KH. Ahmad Azhar Basir,	Yogyakarta	UII Press	I	2002	979-8413-87-3	x + 194	11,5 x 18 cm, HVS 70
18	Dapatkan Aku Memilih Dalam Hidup Ini	Sri Haryati Djawadi/Wisnu	Yogyakarta	UII Press	I	2003	979-3333-21-9	xiv + 120	15 x 21 cm, HVS 70
19	Dasar dan Perancangan Wireless ICT Networks	Firdaus/ M. Fahr/ etika	Yogyakarta	UII Press	I	2015	978-979-3333-86-1	x + 272	15,5 x 21,5 cm, HVS 70
20	Dasar-Dasar Analisis Aliran di Sungai dan Muara	Lalu Maruf	Yogyakarta	UII Press	I	2001	979-3333-75-X	xii + 218	16 x 23 cm, HVS 70
21	Dinamika Ekonomi Indonesia	Prof. Dr. Edy Suandi Hamid	Yogyakarta	UII Press	I	2012	978-979-3333-45-8	x + 176	15 x 21 cm, HVS 70
22	Dinamika Kinerja Fiskal Di Indonesia	Dr. Jaka Sriyana	Yogyakarta	UII Press	I	2015	978-979-3333-49-6	xx + 294	16 x 23 cm, HVS 70

O	JUDUL BUKU	PENGARANG	KOTA TERBIT	PENERBIT	CET.	THN.	ISBN	JUMLAH HALAMAN	UKURAN	H.
1	Korupsi & Penguatan Daulat Hukum	Ahmad fauzi	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-83-0	xii + 182	15,5 x 23 cm, HVS 70	
2	Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontrol	Dr. Rusli Muhammad, SH, N	Yogyakarta	Ull Press	I	2013	978-989-3333-51-9	xii + 200	16 x 23 cm, HVS 70	
3	Matkamah Konstitusi Dalam Sistem ketatanegaraan	Soimin, SH., M. Hum & M	Yogyakarta	Ull Press	I	2013	978-979-333-50-2	xvi + 352	16 x 23 cm, HVS 70	
4	Manajemen Asuransi Syariah	Dr. Novi Puspitasari, SE., N	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-91-5	xxx + 234	16 x 23 cm, HVS 70	
5	Manajemen BMT Edisi Revisi	M. Ridwan	Yogyakarta	Ull Press	I	2014	979-3333-30-3	xii + 224	15 x 21 cm, HVS 70	
6	Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat	Drs. Supardi, MM.	Yogyakarta	Ull Press	I	2001	979-8413-68-7	xiii + 166	15,5 x 22,5 cm, HVS 70	
7	Mantu Panduan Lengkap Menyelenggarakan Acara Perr	Sutrisno Sastro Utomo	Yogyakarta	Ull Press	I	2014	978-979-3333-66-3	viii + 128	11,5 x 18 cm, HVS 70	
8	Media, Jurnalisme dan Budaya Populer	Masduki, Editor	Yogyakarta	Ull Press	I	2008	979-3333-94-3	xii + 265	14,5 x 21 cm, HVS 70	
9	Media, Kematian & Identitas Budaya Minoritas	Iwan Awaluddin	Yogyakarta	Ull Press	I	2005	979-3333-66-5	xviii + 250	15,5 x 23 cm, HVS 70	
0	Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah	Murtir Jeddawi	Yogyakarta	Ull Press	I	2005	979-3333-71-3	xv + 202	16 x 23 cm, HVS 70	
1	Memperkokoh Otonomi Daerah	Edi Suandy Hamid & Sobiri	Yogyakarta	Ull Press	II	2005	979-3333-21-1	xii + 252	16 x 23 cm, HVS 70	
2	Mengugat Produk Hukum MPR RI Pasca Amademen U	King Faisal Sulaiman, SH.,	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-87-8	xiv + 170	15,5 x 23 cm, HVS 70	
3	Metode Numerik	Prof. sarwidi	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-72-4	viii + 92	16 x 23 cm, HVS 70	
4	Metode Penemuan Hukum Edisi Revisi	Bambang Sutiyoso	Yogyakarta	Ull Press	IV	2015	978-979-3333-90-8	xvi + 390	15,5 x 23 cm, HVS 70	
5	Model-2 Akad Pembiayaan Pd. Bank Syariah	Muhammad, Mag.	Yogyakarta	Ull Press	I	2009	979-3333-97-9	xi + 216	14,5 x 21 cm, HVS 70	
6	Muhammadiyah sebagai Oposisi	Soewarno	Yogyakarta	Ull Press	II	2002	979-8413-74-1	xv + 222	15 x 21 cm, HVS 70	
7	Negara dan Pemerintahan dalam Islam	KH. Ahmad Azhar Basir, M	Yogyakarta	Ull Press	VI	2000	979-8413-54-7	vii + 80	11 x 18 cm, HVS 70	
8	Neo-Sufisme dan Pudarnya Fundamentalisme di Pedesa	Abd. Munir Mulikan	Yogyakarta	Ull Press	I	2000	979-8413-50-4	xi + 292	15,5 x 23 cm, HVS 70	
9	New Concept English For Children	Lukman I'akim	Yogyakarta	Ull Press	I	2006	979-8413-84-7	vii + 85	16 x 23 cm, HVS 70	
0	Nilai-Nilai Ilahiah Remaja/Pelajar	H. Kamrani Busyeiri	Yogyakarta	Ull Press	I	2004	979-3333-30-2	xxii + 238	15 x 21 cm, HVS 70	
1	Orde Baru & Orde Transisi	Prof. Dr. Dawam Raharjo	Yogyakarta	Ull Press	I	1999	979-8413-20-2	viii + 154	16 x 22 cm, HVS 70	
2	Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum	Burhanuddin Susanto	Yogyakarta	Ull Press	I	2008	979-3333-95-2	viii + 178	14,5 x 21 cm, HVS 70	
3	Payung Hukum Perbankan Syariah	Prof. Abd. Ghofur Anshori	Yogyakarta	Ull Press	I	2008	979-3333-88-X	x + 448	16 x 23 cm, HVS 70	
4	Payung Hukum Perbankan Syariah Edisi Lengkap	Prof. Abd. Ghofur Anshori	Yogyakarta	Ull Press	II	2009	979-3333-88-X	xii + 520	16 x 23 cm, HVS 70	
5	Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak	Fanani,SHI. MSI	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-80-9	xiv + 208	16 x 23 cm, HVS 70	
6	Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi & Konversi	Prof. Abd. Ghofur Anshori	Yogyakarta	Ull Press	I	2010	979-3333-84-7	x + 206	14,5 x 21 cm, HVS 70	
7	Pembentukan Peraturan Perundang2-an Negara di Indone	Soimin, SH., M.Hum.	Yogyakarta	Ull Press	I	2010	979-3333-83-9	x + 252	16 x 23 cm, HVS 70	
9	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia	Edi Hudiata, LC., M.H	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-85-4	xx + 210	15,5 x 23 cm, HVS 70	
0	Peradilan Agama di Indonesia	Prof. Abd. Ghofur Anshori	Yogyakarta	Ull Press	II	2011	979-3333-88-X	xviii + 204	16 x 23 cm, HVS 70	
1	Perekonomin Indonesia (Masalah dan Kebijakan Kont.)	Edy Suandi Hamid	Yogyakarta	Ull Press	II	2000	979-8413-33-4	xiii + 259	15 x 22,5 cm, HVS 70	
3	Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah	Sayuti Una, MH.	Yogyakarta	Ull Press	II	2005	979-3333-34-6	xiv + 224	16 x 23 cm, HVS 70	
4	Perpajakan Buku Satu	Drs. Muqoddim, MBA, Ak.	Yogyakarta	Ull Press	II	1999	979-8413-25-3	xii + 161	19 x 24 cm, HVS 70	
5	Pesona Akhlak Rosulullah SAW	Ahmad Sarwono	Yogyakarta	Ull Press	II	2003	979-3333-05-7	xiii + 132	13 x 19 cm, HVS 70	
6	Pokok-Pokok Hukum Perkapalan	Jauhari Santoso	Yogyakarta	Ull Press	II	2004	979-3333-04-9	viii + 86	15 x 21 cm, HVS 70	
7	Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam Cet. 2	KH. Ahmad Azhar Basir, M	Yogyakarta	Ull Press	I	2011	979-8413-48-2	viii + 66	11,5 x 18 cm, HVS 70	
8	Politik Bermoral Agama	Ahmad Hakim & M. Thalh	Yogyakarta	Ull Press	I	2005	979-3333-06-5	xvii + 147	15 x 21 cm, HVS 70	
9	Politik Perpajakan	Edy Slamet & Syarifuddin	Yogyakarta	Ull Press	I	2005	979-3333-78-7	xiv + 208	15 x 21 cm, HVS 70	
0	Presiden, Partai Dan Pemulihan Ekonomi Indonesia	Dr. Bambang Cipto, MA.	Yogyakarta	Ull Press	I	2003	979-3333-06-5	xvii + 149	15 x 21 cm, HVS 70	

JUDUL BUKU	PENGARANG	KOTA TERBIT	PENERBIT	CET.	THN.	ISBN	JUMLAH HALAMAN	UKURAN	HA
1 Priaku Seks Menjimpang dan Seksualitas Kont. Umat Is	Marzuki Umar Sa'ban	Yogyakarta	Ull Press	I	2001	979-8413-72-5	viii + 354	16 x 25 cm, HVS 70	2
2 Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Alquran	Muhammad, Sag. Mag.	Yogyakarta	Ull Press	III	2003	979-8413-53-9	xvii + 93	11 x 18 cm, HVS 70	1
3 Profesionalisme Akuntabilitas Amal Usaha Muhammadiyah	Edy Suandi Hamid	Yogyakarta	Ull Press	I	2005	979-3333-74-3	xx + 184	14 x 20,5 cm, HVS 70	2
4 Public Relation : Sebagai Strategic Tools	Herien Priyono	Yogyakarta	Ull Press	I	2005	979-3333-66-1	ix + 144	15 x 21 cm, HVS 70	2
5 Quasi Battle Ground Kelompok Ichwan & Proletarian	IlP Wijayanto	Yogyakarta	Ull Press	I	2000	-	xii + 89	11,5 x 18 cm, HVS 70	1
6 Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya / HC, CU IX Ed. 2	Prof. H. Zaini Dahlan, MA.	Yogyakarta	Ull Press	XI	2014	979-8413-18-0	xliv + 1228	15,5 x 20,8 cm, HVS 70	12
7 Reformasi Keadilan & Penegakan Hukum di Indonesia	Bambang Sutiyoso	Yogyakarta	Ull Press	I	2010	979-3333-85-5	xx + 284	16 x 23 cm, HVS 70	4
8 Reformasi Kepolisian	Suwarni, S.Sos., M.Si.	Yogyakarta	Ull Press	II	2010	978-979-1503-27-3	xii + 272	15,5 x 23,5 cm, HVS 70	4
9 Reorientasi Ekonomi Syariah	Ahmad Mustofa, Unggul P.	Yogyakarta	Ull Press	I	2014	978-979-3333-70-0	xiv + 256	15,5 x 21 cm, HVS 70	4
10 Sejarah Hidup Maryam	Aliah Schleider / Ali M.	Yogyakarta	Ull Press	I	2004	979-3333-23-5	xxiv + 166	15 x 21 cm, HVS 70	2
11 Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen	King Faisal Sulaiman, SH.,	Yogyakarta	Ull Press	I	2013	978-979-3333-62-5	xvi + 298	16 x 23 cm, HVS 70	7
12 Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah CU th	Muhammad	Yogyakarta	Ull Press	VI	2014	979-8413-56-3	xii + 198	15 x 21 cm, HVS 70	3
13 Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri & Isu-Isu Ekonomi	Edy Suandi Hamid	Yogyakarta	Ull Press	I	2004	979-3333-26-X	xiv + 262	16 x 23 cm, HVS 70	3
14 Statistik Industri I	Ahmad Fauzi	Yogyakarta	Ull Press	I	2001	979-8413-80-6	x + 178	19,2 x 24,2 cm, HVS 70	2
15 Tantangan Indonesia sebagai Bangsa	Prof. Dr. Dawam Raharjo	Yogyakarta	Ull Press	I	2000	979-8413-21-0	viii + 172	16 x 22 cm, HVS 70	2
16 Tanya Jawab Perbankan Syariah	Dr. Abd. Ghofur Anshori	Yogyakarta	Ull Press	II	2010	979-3333-90-9	x + 116	14,5 x 21 cm, HVS 70	2
17 Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingk. MK.	Bambang Sutiyoso	Yogyakarta	Ull Press	I	2009	979-3333-98-3	xii + 272	14,5 x 21 cm, HVS 70	4
18 Teori Identitas Sosial	Atthouul Afif	Yogyakarta	Ull Press	I	2015	978-979-3333-84-7	viii + 128	15,5 x 23 cm, HVS 70	2
19 Teori Keuangan Islam	Ahmad Dimiyati, Mag	Yogyakarta	Ull Press	I	2008	-	viii + 172	15 x 21 cm, HVS 70	2
20 Terorisme Negara Kerjasama Kospiratif Untuk menjinakk	Prof. Djawahir Thontowi	Yogyakarta	Ull Press	I	2013	978-979-3333-60-1	I + 276	16 x 24 cm, HVS 70	7
21 Undang-Undang No. 32 & 33 Tahun 2004 Tentang Pemd	Hidayat	Yogyakarta	Ull Press	II	2005	-	xvi + 342	15 x 23 cm, HVS 70	3
22 Wajah Baru Islam di Indonesia	Kamaruzzaman Ahmad	Yogyakarta	Ull Press	I	2004	979-3333-22-2	xxiv + 414	16 x 23 cm, HVS 70	3

Ull Press:

K Di Tiro No. 1, YOGYAKARTA 55223

(0274) 547865, Fax. (0274) 547864

Sasaran: Jl. Sorowajan Baru Gedung SMA Ull Sayap Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta

0274-9246024, Hp. 0815 7885 1012 CP. Bp. Muhtarom

Alamat Transfer:

BRI BRITAMA CAB. CIK DI TIRO

YOGYAKARTA A/N. ULL PRESS

NO. REK. 0029-01-013006-50-6

Laporan Frekuensi Tahunan
Katalog Per kriteria periode 2000 s/d 2017
Berdasarkan Kelas DDC

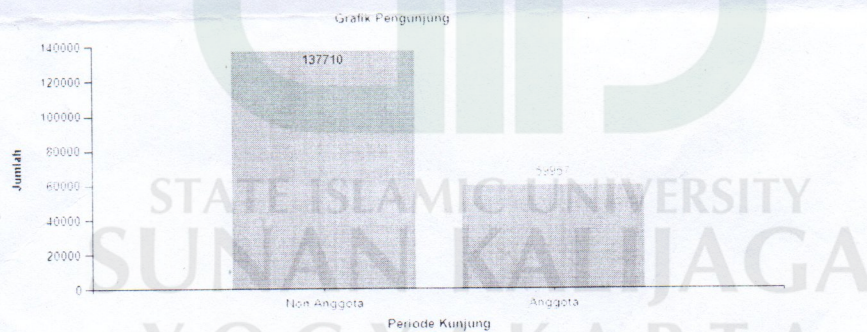
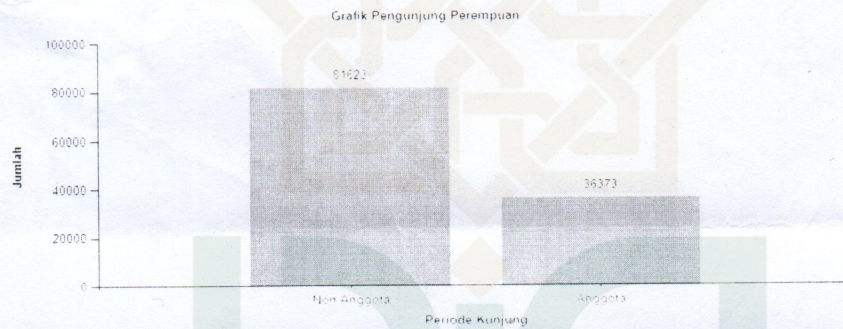
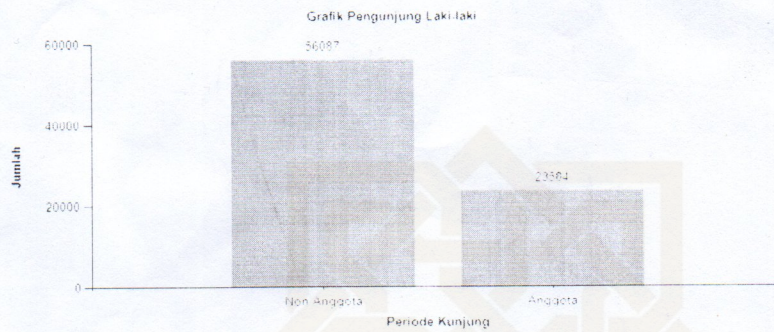
No.	Tanggal	Kelas Besar	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	2009	000 - Karya Umum	3121	5013
2	2010	000 - Karya Umum	10	18
3	2011	000 - Karya Umum	618	1268
4	2012	000 - Karya Umum	230	282
5	2013	000 - Karya Umum	722	1632
6	2014	000 - Karya Umum	254	750
7	2015	000 - Karya Umum	742	1558
8	2016	000 - Karya Umum	675	1305
9	2017	000 - Karya Umum	119	124
10	2009	100 - Filsafat dan Psikologi	1589	2791
11	2010	100 - Filsafat dan Psikologi	4	7
12	2011	100 - Filsafat dan Psikologi	227	411
13	2012	100 - Filsafat dan Psikologi	143	240
14	2013	100 - Filsafat dan Psikologi	255	515
15	2014	100 - Filsafat dan Psikologi	113	289
16	2015	100 - Filsafat dan Psikologi	342	838
17	2016	100 - Filsafat dan Psikologi	404	1173
18	2017	100 - Filsafat dan Psikologi	80	93
19	2009	200 - Agama	4012	6857
20	2010	200 - Agama	19	58
21	2011	200 - Agama	832	1551
22	2012	200 - Agama	429	618
23	2013	200 - Agama	816	1435
24	2014	200 - Agama	189	389
25	2015	200 - Agama	6125	11652
26	2016	200 - Agama	1053	2530
27	2017	200 - Agama	278	293
28	2009	300 - Ilmu Sosial	11759	19012
29	2010	300 - Ilmu Sosial	10	18
30	2011	300 - Ilmu Sosial	969	1902
31	2012	300 - Ilmu Sosial	704	1210
32	2013	300 - Ilmu Sosial	1932	3110
33	2014	300 - Ilmu Sosial	387	1049
34	2015	300 - Ilmu Sosial	1899	3663
35	2016	300 - Ilmu Sosial	2687	5345
36	2017	300 - Ilmu Sosial	545	599
37	2009	400 - Bahasa	2260	3357
38	2011	400 - Bahasa	124	208
39	2012	400 - Bahasa	106	234
40	2013	400 - Bahasa	136	323
41	2014	400 - Bahasa	79	209
42	2015	400 - Bahasa	399	768
43	2016	400 - Bahasa	236	390
44	2017	400 - Bahasa	76	87
45	2009	500 - Ilmu Murni	1566	2471
46	2010	500 - Ilmu Murni	3	4
47	2011	500 - Ilmu Murni	168	309

48	2012	500 - Ilmu Murni	98	146
49	2013	500 - Ilmu Murni	326	574
50	2014	500 - Ilmu Murni	95	378
51	2015	500 - Ilmu Murni	535	950
52	2016	500 - Ilmu Murni	346	681
53	2017	500 - Ilmu Murni	84	90
54	2009	600 - Ilmu Terapan	7922	12845
55	2010	600 - Ilmu Terapan	5	11
56	2011	600 - Ilmu Terapan	811	1430
57	2012	600 - Ilmu Terapan	449	809
58	2013	600 - Ilmu Terapan	1138	2081
59	2014	600 - Ilmu Terapan	310	822
60	2015	600 - Ilmu Terapan	1317	2979
61	2016	600 - Ilmu Terapan	1139	3285
62	2017	600 - Ilmu Terapan	239	252
63	2009	700 - Kesenian dan Olahraga	1711	2572
64	2010	700 - Kesenian dan Olahraga	2	4
65	2011	700 - Kesenian dan Olahraga	245	419
66	2012	700 - Kesenian dan Olahraga	455	736
67	2013	700 - Kesenian dan Olahraga	390	862
68	2014	700 - Kesenian dan Olahraga	199	607
69	2015	700 - Kesenian dan Olahraga	529	1231
70	2016	700 - Kesenian dan Olahraga	471	1095
71	2017	700 - Kesenian dan Olahraga	61	73
72	2009	800 - Kesusasteraan	3592	5439
73	2010	800 - Kesusasteraan	2	2
74	2011	800 - Kesusasteraan	509	947
75	2012	800 - Kesusasteraan	1829	2738
76	2013	800 - Kesusasteraan	638	1496
77	2014	800 - Kesusasteraan	228	567
78	2015	800 - Kesusasteraan	719	1520
79	2016	800 - Kesusasteraan	816	2074
80	2017	800 - Kesusasteraan	152	181
81	2009	900 - Sejarah dan Geografi	1944	3012
82	2010	900 - Sejarah dan Geografi	2	2
83	2011	900 - Sejarah dan Geografi	281	650
84	2012	900 - Sejarah dan Geografi	170	326
85	2013	900 - Sejarah dan Geografi	410	987
86	2014	900 - Sejarah dan Geografi	181	601
87	2015	900 - Sejarah dan Geografi	582	1078
88	2016	900 - Sejarah dan Geografi	553	1121
89	2017	900 - Sejarah dan Geografi	71	99
90	2009	Lainnya	4370	6996
91	2010	Lainnya	510	837
92	2011	Lainnya	1466	2292
93	2012	Lainnya	280	326
94	2013	Lainnya	100433	138458
95	2014	Lainnya	2193	2560
96	2015	Lainnya	1101	1474
97	2016	Lainnya	159	206
98	2017	Lainnya	1	1
Total			191515	298880

Laporan Jumlah Pengunjung Tahunan Status Pengunjung, Periode Per 2016 s/d 2017

Tahun Kunjungan	ANGGOTA			NON ANGGOTA		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pengunjung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pengunjung
2017	5.714	9.377	15.091	12.558	18.326	30.884
2016	17.870	26.996	44.866	43.529	63.297	106.826
Total	23.584	36.373	59.957	56.087	81.623	137.710

NO	Tahun Kunjungan	Status Pengunjung				
		NON ANGGOTA	ANGGOTA			
1	2017			12.558	18.326	30.884
				5.714	9.377	15.091
2	2016			43.529	63.297	106.826
				17.870	26.996	44.866
Total				79.671	117.996	197.667



STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rasyid Ma'ruf
TTL : Sleman, 12 Mei 1992
Alamat : Baturan RT/RW 02/19, Trihanggo,
Gamping, Sleman, Yogyakarta
Email : maruf.rufy@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta (2005)
2. SMP Negeri 6 Yogyakarta (2008)
3. SMA Negeri 1 Gamping Sleman (2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota ALUS (Organisasi Mahasiswa Ilmu Perpustakaan) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA